

**RENCANA KERJA (RENJA)
DISKOMINFO
TAHUN 2025**



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LANDAK**

Alamat : Jalan Raya Ngabang-Pontianak KM. 3 Ngabang Kode Pos 78357

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak Tahun 2025 dapat terselesaikan. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak Tahun 2025 ini atas dasar usulan Program dan Kegiatan dari setiap Bidang dan seksi serta usulan dari barbagai pihak.

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renja Kerja Pemerintah Daerah bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyiapkan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan dilanjutkan dengan Penyusunan Renja Kerja (Renja) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta menetapkan Renja SKPD setelah disesuaikan dengan Renstra 2023 – 2026, oleh karena itu setiap SKPD berkewajiban untuk Menyusun Renja SKPD.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak Tahun 2025 hendaknya dapat merespon perubahan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal. Perubahan lingkungan tersebut diprediksi akan melatarbelakangi beberapa perubahan skema-skema perencanaan dalam bentuk Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pembangunan yang disusun berdasarkan penganggaran terpadu menurut klasifikasi organisasi, fungsi dan jenis belanja serta penyusunan program kerja yang berkesinambungan berbasis kinerja, sehingga akan mewarnai penyusunan Rencana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak.

Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun yang akan digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2025 serta untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan.

Namun Demikian , disadari bahwa hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran terhadap materi dan substansi pokok RENJA tersebut sangat diharapkan, sehingga terjadi peningkatan kualitas rencana yang berkelanjutan. Akhirnya, kepada semua pihak yang membantu penyusunan Renja ini kami ucapkan terima kasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan dan melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amiin.

Ngabang , 5 Juli 2024

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika
Kabupaten Landak



EFRAIM PATA'ALLORANTE, ST, M.AP
NIP. 19680207 200212 1 007

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar.....	I
DAFTAR ISI	iii
Bab I Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Diskominfo Kabupaten Landak Tahun 2023.....	11
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Diskominfo... ..	11
2.2 Analisi Kinerja Pelayanan Dinas Perangkat Daerah.....	27
2.3 Isu – isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	44
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	53
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dan Kegiatan Masyarakat.....	63
Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	64
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	64
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	74
Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.....	83
Bab V Penutup.....	101

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1 Pengertian Renja (Rencana Kerja)

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode satu tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Agar pelaksanaan tugas yang telah digariskan berjalan dengan efektif dan terarah, maka penyusunan dan penetapan Renja Perangkat Daerah menjadi mutlak, yaitu sebagai pedoman untuk menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

1.1.2 Proses Penyusunan Renja (Rencana Kerja)

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja PD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting PD, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi

kinerja terhadap pencapaian Renstra PD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja OPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala PD menetapkan Renja PD untuk menjadi pedoman di lingkungan PD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

Prinsip Penyusunan :

1. Substansi Renja PD merupakan perbaikan dari materi Rancangan Renja PD yang disesuaikan dengan Perkada RKPD.
2. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan
3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/ kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan.
4. Renja PD merupakan dokumen resmi program dan kegiatan OPD yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA OPD setelah memperhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Adapun Tahapan Penyusunan Renja sebagai berikut:

- A. Persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah meliputi :
 - a. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusunan Renja Perangkat Daerah
 - b. Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah
 - c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah
 - d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD

- B. Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah
Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah mencakup :
 - a. Pendahuluan;
 - b. Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu
 - c. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah
 - d. Rencana Kerja dan pendanaan perangkat daerah
 - e. Penutup
- C. Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah
- D. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah
- E. Perumusan Akhir Renja Perangkat Daerah
- F. Penetapan Renja Perangkat Daerah

1.1.3 Keterkaitan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak dengan Dokumen-Dokumen Perencanaan Lainnya

- a. Keterkaitan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak dengan Dokumen RKPD Kabupaten Landak.

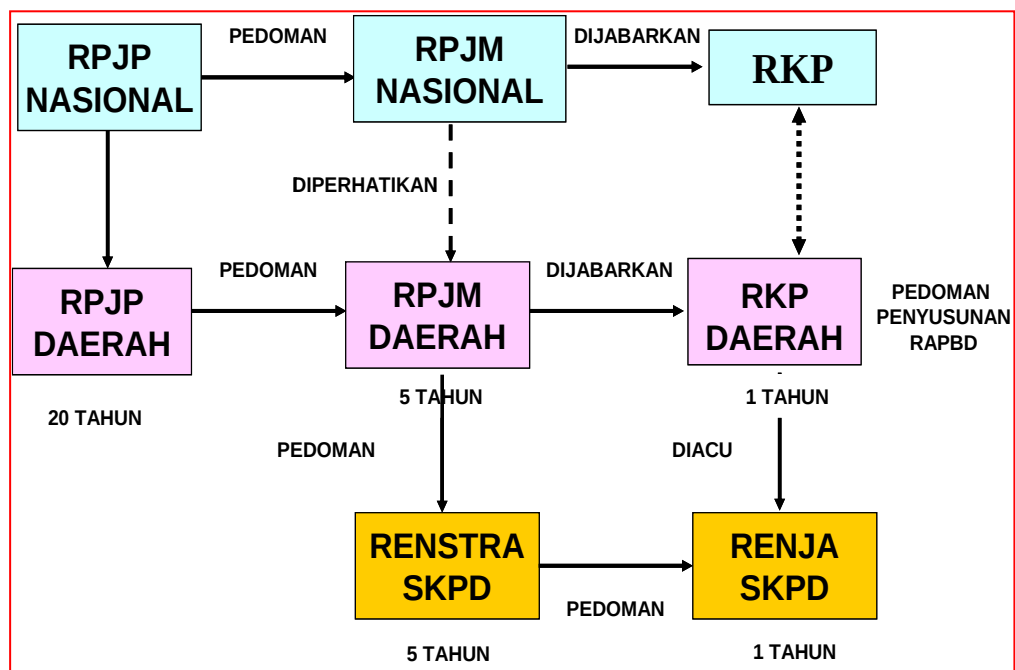
Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak berpedoman pada RKPD Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan :

1. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak sebagai dokumen teknis sebagai penjabaran RKPD;
2. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak memuat Arah Kebijakan Teknis dan Indikasi rencana program setiap bidang kewenangan dan atau fungsi tugas pemerintahan untuk jangka waktu satu tahun yang disusun oleh Perangkat Daerah yang berkoordinasi dengan BAPPEDA;

- b. Keterkaitan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak dengan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak.

Penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak berpedoman pada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak yang disusun sebagai dokumen Rencana Kerja Tahunan yang merupakan kompilasi rencana kerja bidang teknis setiap tahun anggaran.

Keterkaitan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak dengan Dokumen-Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Pasal 18 Ayat (6) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 ;

- b. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3094) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2014 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;

- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- n. Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah ;
- o. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 - 2026 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 Nomor 12);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Landak Tahun 2007 – 2027 (Lembaran Daerah Nomor 11 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57);
- r. Peraturan Bupati Landak Nomor 48 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata

- kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 768);
- s. Peraturan Bupati Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2022 Nomor 5);
 - t. Peraturan Bupati Landak Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 - 2026 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2022 Nomor 6);

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak adalah :

- a. Memberikan arah, pedoman dan landasan bagi jajaran dinas dalam melaksanakan prioritas-prioritas pembangunan bidang Komunikasi dan Informatika serta Statistik dan Persandian ;
- b. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam perencanaan pembangunan bidang Komunikasi, Informatika , Statistik dan Persandian ;
- c. Mempermudah pengendalian dan pengawasan dalam program kegiatan bidang Komunikasi dan Informatika serta Statistik dan Persandian ;
- d. Memberikan gambaran kondisi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak dalam satu tahun ke depan yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pembangunan bidang Komunikasi dan Informatika serta Statistik dan Persandian ;

- e. Sebagai bahan acuan dalam menyusun pertanggungjawaban Kepala Dinas atas kinerja Dinas selama 1 (satu) tahun dalam bentuk Laporan Kinerja.

1.3.2 Tujuan

- a. Menyediakan suatu tolok ukur dalam upaya mengevaluasi kinerja tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak;
- b. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan;
- c. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak Tahun 2025 disusun menurut Sistematika Penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN

LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.3. Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB. IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAEAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LANDAK TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak

Pada akhir pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2023 dilakukan evaluasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi kemampuan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas pokok fungsinya yang tertuang dalam program dan kegiatan.

Keberhasilan program dan kegiatan dapat dilihat dari laporan kinerja dan laporan keuangannya. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka melaksanakan anggaran (APBD). Sedangkan Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

5 Program, 12 Kegiatan, dan 47 sub kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dengan tingkat capaian kinerja dan realisasi APBD sangat baik yaitu mencapai 94.36 % .Evaluasi kinerja ditentukan oleh hasil manfaat input dan output. Input terbatas pada nilai uang yang digunakan dalam menghasilkan output, sedangkan output adalah hasil fisik dari suatu kegiatan. Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak Tahun 2023 seperti pada Tabel 2.1.

berikut Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat dalam Tabel 2.1

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2023

Kode	Program / Kegiatan / Sub Keiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2023 – 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024 (Tahun berjalan)		
					Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2024 (Tahun Berjalan) %	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	(8)=(7)/(6)	9	10	(11)=(10)/(4)	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana kerja, meningkatnya evaluasi Kinerja dan laporan keuangan/aset	100%	88,89%	100 %	100 %	100 %	100%	111.11 %	111.11 %
		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra-PD , Renja-PD, RKA-SKPD, DPA-SKPD, LAKIP-PD dan evaluasi renja	32 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	100 %	8 Dokumen	12 Dokumen	37.5 %
		Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28 Dokumen	1 Dokumen	7 Dokumen	1 Dokumen	14.29 %	7 Dokumen	2 Dokumen	7,14 %

				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	2 Dokumen	50 %
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12 Dokumen	0 Dokumen	3 Dokumen	0 Dokumen	0 %	3 Dokumen	0 Dokumen	0 %
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	50 %
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	12 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	33.33 %	3 Dokumen	1 Dokumen	8.33 %
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 Laporan	1 laporan	5 Laporan	1 Laporan	20%	5 Laporan	2 Laporan	10 %
				Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16 Laporan	10 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	100 %	4 Laporan	10 Laporan	62.5 %

				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah kantor yang disediakan	48 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100 %	12 laporan	15 Laporan	31.25 %
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	51 Orang	40 Orang	45 Orang	40 Orang	88.89 %	47 Orang	80 Orang	156.86 %
				Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	34 Dok	12 Dokumen	14 Dokumen	12 Dokumen	85.71 %	10 Dokumen	24 Dokumen	70.59 %
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	955 Dokumen	230 Dokumen	230 Dokumen	230 Dokumen	100 %	235 Dokumen	263 Dokumen	27.54 %
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	48 Dokumen	0 Dokumen	12 Dokumen	- Dokumen	0 %	12 Dokumen	0 Dokumen	0 %
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 laporan	100 %	1 Laporan	1 Laporan	25 %
				Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	12 Dokumen	0 Dokumen	3 Dokumen	0 Dokumen	0 %	3 Dokumen	0 Dokumen	0 %
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan	120 Laporan	30 Laporan	30 Laporan	30 Laporan	100 %	30 Laporan	30 Laporan	25 %

				Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD								
				Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	8 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	25 %
				Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	36 Laporan	4 Laporan	9 Laporan	4 Laporan	44.44 %	9 Laporan	4 Laporan	11,11 %
				Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	0%	1	0 Laporan	0 %
				Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	0 Unit	1 Dokumen	0 Dokumen	0%	1 Dokumen	0 Dokumen	0 %
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	4 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	0 %	1 Laporan	0 Laporan	0 %
				Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	0 %	1 Laporan	0 Laporan	0 %
				Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang	8 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100 %	2 Laporan	2 Laporan	25 %

				Milik Daerah pada SKPD	Milik Daerah pada SKPD								
				Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100 %	2 Laporan	2 Laporan	25 %
				Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 %	1 Dokumen	0 Dokumen	0 %
				Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	16 Laporan	0 Laporan	4 Laporan	0 Laporan	0 %	4 Laporan	0 Laporan	0 %
				Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 %	1 Dokumen	0 Dokumen	0%
				Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	4 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 %	1 Dokumen	0 Dokumen	0 %
				Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	4 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	0 %	1 Laporan	0 Laporan	0 %
				Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	0 %	1 Laporan	0 Laporan	0 %
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Kepegawaian	32 Laporan	5 Laporan	8 Laporan	5 Laporan	62.5 %	8 Laporan	5 Laporan	15.625 %

				Sub Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	18 Unit	0 Unit	3 Unit	0 Unit	0%	4 Unit	0 Unit	0 %
				Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	172 Paket	52 Paket	43 Paket	52 Paket	120.93 %	43 Paket	52 Paket	30,23 %
				Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	25 %
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	25 %
				Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	25 %
				Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	0 Orang	5 Orang	0 Orang	0 %	5 Orang	0	0 %
				Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	0 Orang	5 Orang	0 Orang	0 %	5 Orang	0	0 %
				Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	0 Orang	5 Orang	0 Orang	0 %	5 Orang	0 Orang	100 %

			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Administrasi Umum Perangkat Daerah	52 Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	100 %	12 Kegiatan	12 Kegiatan	23.08 %
			Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100 %	1 Paket	1 Paket	25 %
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100 %	1 Paket	1 Paket	25 %
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100 %	1 Paket	2 Paket	40 %
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100 %	1 Paket	1 Paket	25 %
			Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100 %	1 Paket	1 Paket	25 %
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1500 Dok	21.576	3.600	21.576	599.33 %	3.700	26.970	1798 %
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		1 Laporan	1 Paket	1 Paket	100 %	1 Paket	1 Paket	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	0 %	1 Laporan	0 Laporan	0 %

				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	195 Laporan	90 Laporan	40 Laporan	90 Laporan	225 %	45 Laporan	110 Laporan	56,41%
				Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	48 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100 5	12 Laporan	12 Dokumen	25 %
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	2,99 %	100 %	2.99 %	0,0299 %	100 %	2,99 %	2,99 %
				Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	8 Unit	0 Unit	2 Unit	0 Unit	0 %	2 Unit	0 Unit	0 %
				Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	184 Unit	0 Unit	46 Unit	0 Unit	0 %	46 Unit	0 Unit	0 %
				Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit	0 Unit	5 Unit	0 Unit	0%	5 Unit	0 Unit	0 %
				Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	20 Unit	0 Unit	5 Unit	0 Unit	0 %	5 Unit	0 unit	0%
				Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	0 Unit	1 Unit	0 Unit	0 %	1 Unit	0 Unit	0 %
				Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit	8 Unit	5 Unit	8 Unit	160 %	5 Unit	8 Unit	40 %

				Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 Unit	1 Unit	3 Unit	1 Unit	33.33 %	3 Unit	1 Unit	8.33 %
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	71,43 %	100 %	0,7143 %	129 %	100 %	114.29 %	114,29 %
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyura	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	1 Laporan	25 %
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	16 Laporan	3 Laporan	4 Laporan	3 Laporan	75 %	4 Laporan	6 laporan	37.5 %
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	0 %	1 Laporan	0 Laporan	0 %
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100 %	1 Laporan	1 Laporan	25 %
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Operasional dan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	16.88 %	100 %	16.88 %	0,1688 %	100 %	16.88 %	16.88 %
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	10 Unit	1 Unit	10 Unit	1 Unit	10 %	10 Unit	1 Unit	10 %

			Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya								
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	0 Unit	1 Unit	0 Unit	0 %	1 Unit	0 Unit	0 %
			Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	40 Unit	0 Unit	40 Unit	0 Unit	0 %	40 Unit	0 Unit	0 %
			Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	100 %	10 Unit	10 Unit	100 %
			Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	0 Unit.	5 Unit.	0 Unit.	0 %	5 Unit.	0 Unit.	0 %
			Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	0 Unit	1 Unit.	0 Unit	0 %	1 Unit	0 Unit	0 %
			Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	100 %	5 Unit	5 Unit	100 %
			Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	0 Unit	5 Unit	0 Unit	0 %	5 Unit	0 Unit	0 %
			Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Informasi Pembangunan Daerah yang	65 %	43.34 %	50 %	43.34 %	86.68 %	55 %	43.34 %	66.75 %

					disebarluaskan								
				Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	PersentaseTerlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	70 %	51.64 %	60 %	51.64 %	86,07 %	65 %	51.64 %	73.77 %
				Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Pengelolaan Konten dan media Komunikasi Publik	12 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100 %	3 Dokumen	3 Dokumen	25 %
				Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	8 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	20 %
				Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang meningkatkan kapasitasnya	24 Orang	0 Orang	6 Orang	0 Orang	0 %	6 Orang	0 Orang	0 %
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau kebijakan	128 Dokumen	36 Dokumen	32 Dokumen	36 Dokumen	112.5 %	32 Dokumen	36 Dokumen	28.13 %
				PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Jumlah Layanan Aplikasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah	76 Unit	11 Unit	61 Unit	11 Unit	18.03 %	66 Unit	11 Unit	14.47 %
					Jumlah Pengusulan Infrastruktur Telekomunikasi kepada Penyedia Layanan Telekomunikasi	400 Unit	280 Unit	280 Unit	280 Unit	100 %	320 Unit	280 Unit	70 %

			Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan domain pemerintah daerah	76 Perangkat Daerah	61 Perangkat Daerah	61 Perangka t Daerah	61 Perangkat Daerah	100 %	66 Perangkat Daerah	61 Perangkat Daerah	80.26 %
			Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	10 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	2 Dokumen	1 Dokumen	10 %
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daera	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	38 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	100 %	20 Unit	10 Unit	26.32 %
			Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Konsultasi dan Koordinasi Pengusulan Infrastruktur Telekomunikasi kepada Penyedia Layanan Telekomunikasi	62 Kali	42 Kali	42 Kali	42 Kali	100 %	50 Kali	42 Kali	67.74 %
				Jumlah Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100 %	12 Bulan	12 Bulan	100 %
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	8 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100 %	6 Dokumen	5 Dokumen	62.5 %

			Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	76 Unit	9 Unit	61 Unit	9 Unit	14.75 %	66 Unit	9 Unit	11.84 %
			Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	4 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 %	1 Dokumen	0 Dokumen	0 %
			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase tersedianya sistem data statistik sektoral yang terintegrasi	85 %	17.15 %	70 %	17.15 %	24.5 %	75 %	17.15 %	20.18 %
			Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten Landak	Persentase penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten Landak	85 %	17.16 %	70 %	17.16 %	24.51 %	75 %	17.16 %	20.19 %
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektor	12 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100 %	6 Dokumen	6 Dokumen	50 %
			Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	8 Orang	6 Orang	2 Orang	6 Orang	200 %	2 Orang	6 Orang	137.5 %
			Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	25 %

			Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	38 Orang	0 Orang	38 Orang	0 Orang	0 %	38 Orang	0 Orang	0 %
			Sub Kegiatan Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	4 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100 %	1 Unit	1 Unit	25 %
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	4 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	0 %	1 Dokumen	0 Dokumen	0 %
			Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase tersedianya keamanan Informasi Pemerintah	65 %	25 %	50 %	25 %	50 %	55 %	25 %	38.46 %
			Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Landak	Persentase penyelenggaraan persandian keamanan Informasi Pemerintah	65 %	25 %	50 %	25 %	50 %	55 %	25 %	38.46 %
			Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten Landak	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten Landak yang Ditetapkan	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	25 %
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Landak	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Landak	4 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	0 %	1 Laporan	0 Laporan	0 %
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan	4 Laporan	0 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	0 %	1 Laporan	0 Laporan	0 %

			Kabupaten Landak Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Daerah Kabupaten Landak Berbasis Elektronik dan Non Elektronik								
			Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Landak	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	4 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	100 %	1 Perangkat Daerah	1 Perangkat Daerah	25 %

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renja Perangkat Daerah periode sebelumnya, Kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak didasarkan pada Indikator Kinerja yang sudah ditentukan dalam IKU, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis Indikator yang dikaji , disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak yang diatur dalam Peraturan Bupati Landak Nomor 50 Tahun 2018 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak yang diubah dengan Peraturan Bupati Landak Nomor 48 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 768);

Keberhasilan merupakan sesuatu yang bersifat relatif dan sulit diukur sehingga untuk mengetahui keberhasilan perlu dibuat indikator-indikator yang lebih dapat diukur. Oleh karena itu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak menetapkan indikator kinerja periode 2023-2026 sebagai tolok ukur untuk dapat menilai keberhasilan kegiatan yang dilaksanakan.

Indikator kinerja merupakan hal yang bersifat dinamis karena akan tergantung pada perkembangan kondisi, peraturan, anggaran, kebijakan dan lain-lain. Pencapaian terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan akan memberi gambaran tentang sejauh mana organisasi dapat mencapai kinerjanya sesuai *dengan* tugas, peran dan fungsi yang diembannya.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Landak

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra Diskominfo				Realisasi Capaian	Proyeksi				Catatan Analisis
			2023	2024	2025	2026		2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	15	
A.	Indikator sasaran Perangkat Daerah											
1.	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi Publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kot a.	%	45	50	55	60	90,73	90,73	90,73	90,73		
2.	Persentase Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan dan pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak.	%	100%	100%	100%	100%	91,53	100	100,00	100,00		
3.	Nilai LkjIP Dinas Kominfo	Nilai	74,25	74,50	74,75	75,00	73,93	74,50	74,75	75,00		
4.	Persentase Aplikasi yang mendukung Pelayanan Publik.	%	40,00	60,00	80,00	100,00	75,00	75,00	75,00	75,00		

5.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo.	%	26,31	52,63	92,10	100,00	2,63	5,00	5,00	5,00	
6.	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi.	%	85,00	87,00	89,00	92,00	87,50	87,50	87,50	87,50	
7.	Persentase Website yang sudah dikelola oleh Diskominfo.	%	25,00	50,00	75,00	100,00	3,93	83,3	83,3	83,3	
8.	Persentase Website yang sudah dikembangkan oleh Diskominfo.	%	25,00	50,00	75,00	100,00	3,93	83,3	83,3	83,3	
9.	Jumlah SPBE yang dibangun dan dikembangkan untuk menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Jumlah SPBE	71,00	73,00	75,00	77,00	74,00	74,00	75,00	77,00	
10.	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	%	28,57	42,86	57,14	71,43	0,00	10,00	28,57	42,86	
11.	Jumlah Website yang dikelola dan dikembangkan Pemerintah Daerah	Jumlah Website	45,00	47,00	49,00	51,00	74,00	74,00	74,00	74,00	
12.	Menurunnya Desa Non Sinyal (Blank Spot) Area.	Desa	26,00	24,00	22,00	20,00	28,00	28,00	28,00	28,00	
13.	Jumlah Infrastruktur Telekomunikasi yang tersedia	Menara	184,00	187,00	190,00	193,00	181,00	181,00	181,00	181,00	
14.	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral.	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

15.	Persentase Organisasi (OPD) yang menggunakan Data Statistik dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah.	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	96,00	100,00	100,00	100,00	
16.	Persentase Organisasi (OPD) yang menggunakan Data Statistik dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah.	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	96,00	100,00	100,00	100,00	
17.	Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah.	Persen	24,00	24,25	24,50	24,75	28,52	28,52	28,52	28,52	
18.	Persentase Pengamanan Informasi Daerah yang terselenggara dengan baik.	Persen	24,00	24,25	24,50	24,75	28,52	28,52	28,52	28,52	

Indikator capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dari tahun 2023 terdiri dari: (18 indikator), yang dijabarkan sbb:

2.2.1 Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi Publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dengan target Tahun 2023 sebesar 45 % dan realisasi sebesar 90,73 % dilihat dari realisasi capaian Indikator untuk Tahun 2023 tersebut, realiasi Tahun 2023 sudah melebihi dari Target Indikator yang telah ditentukan pada Tahun 2023, ini dikarenakan adanya Anggaran yang mendukung dari capaian indikator ini dan anggaran yang tersedia sudah digunakan semaksimal mungkin untuk mencapai target dari indikator Capaian ini, Kemudian untuk Proyeksi realisasi capaian Indikator Tahun 2024 tidak mengalami peningkatan dari tahun 2023, dimana target Tahun 2024 sebesar 50 % dengan realisasi sebesar 90,73 % sama dengan Realisasi Tahun 2023, kemudian untuk Proyeksi Capaian Indikator tahun 2025 dengan Target sebesar 55 % dengan realisasi Capaian sebesar 90,73, juga sama dengan proyeksi Tahun 2024 Kemudian untuk Tahun 2026 target sebesar 60 % dengan realisasi Proyeksi sebesar 100%. Dilihat dari target dan realisasi tersebut capaian indikator sasarannya sudah melebihi dari target yang telah ditentukan termasuk realisasi proyeksi untuk tahun 2024 yaitu sebesar 90,73 % , realisasi proyeksi untuk tahun 2025 yaitu sebesar 90,73 % dan Realisasi Proyeksi untuk tahun 2026 sebesar 90,73 %. Kemudian untuk indikator Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota merupakan indikator sasaran yang ada didalam Renstra Periode tahun 2023 – 2026.

2.2.2 Persentase Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan dan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak.

Persentase Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan dan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Landak dengan target Tahun 2023 sebesar 100 % dan realisasi sebesar 91,33 % dilihat dari realisasi capaian Indikator untuk Tahun 2023 tersebut, realiasi Tahun 2023 belum bisa mencapai Target Indikator yang telah ditentukan pada Tahun 2023, ini dikarenakan masih kurangnya Anggaran yang mendukung dari capaian indikator ini, kurangnya SDM yang berkompeten, kurangnya koordinasi dengan Dinas – dinas terkait, masih banyak dinas – dinas yang belum memahami terkait pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan dan pengelolaan informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak dan masih kurangnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung dari tercapainya indikator ini, Kemudian untuk Proyeksi realisasi capaian Indikator Tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun 2023, dimana tahun 2024 target sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100%, kemudian untuk tahun 2025 tidak mengalami peningkatan capaian dimana target 100 % dengan realisasi Proyeksi Capaian juga sebesar 100%, kemudian untuk tahun 2026 target sebesar 100% dengan realiasi proyeksi sebesar 100% sama dengan realisasi proyeksi tahun 2025 sebesar 100%. Dilihat dari target dan realisasi tersebut capaian indikator sasarannya ada yang masih belum tercapai dan ada juga yang sudah tercapai sesuai dengan target termasuk realisasi proyeksi untuk tahun 2024 yaitu sebesar 100 % , realisasi proyeksi untuk tahun 2025 juga sebesar 100 % dan proyeksi tahun 2026 sebesar 100%. Dan untuk indikator Kinerja ini merupakan Indikator Sasaran yang ditetapkan di dalam Renstra Diskominfo periode 2023 – 2026.

2.2.3 Nilai LKjIP Dinas Kominfo

Nilai LKjIP Dinas Kominfo dengan target Tahun 2023 sebesar 74,25 % dan realisasi sebesar 73,93 % dilihat dari realisasi capaian Indikator untuk Tahun 2023 tersebut, realiasi Tahun 2023 belum bisa mencapai Target Indikator yang telah ditentukan pada Tahun 2023, ini dikarenakan masih banyak dokumen –

dokumen dan bukti dukung yang belum dilengkapi dikarenakan kurangnya konsultasi dan koordinasi dengan Dinas terkait, masih kurangnya jumlah SDM dalam penyusunan kelengkapan dokumen sakip, terlambatnya data – data yang disampaikan oleh Bidang dalam penyusunan kelengkapan Dokumen Sakip , Kemudian untuk Proyeksi realisasi capaian Indikator Tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun 2023 atau kenaikan dimana untuk tahun 2023 target sebesar 74,25% dengan realisasi sebesar 73,95 %, tahun 2024 target sebesar 74,50 % dengan realisasi proyeksi sebesar 74,50 %, untuk tahun 2025 target 74,75 % dengan realisasi Proyeksi sebesar 74,75 % kemudian untuk tahun 2026 target sebesar 75 % dengan realisasi proyeksi sebesar 75,00 % sesuai dengan target yang ditentukan. Dilihat dari target dan realisasi tersebut capaian indikator sarannya ada yang belum tercapai dan ada yang sudah tercapai sesuai dengan target yang telah ditentukan termasuk realisasi proyeksi untuk tahun 2024 yaitu sebesar 74,50 %, untuk tahun 2025 yaitu sebesar 74,75 % dan realisasi proyeksi untuk tahun 2026 sebesar 75,00%. Untuk Indikator Persentase Nilai LKjIP Dinas Kominfo merupakan indikator Kinerja Sasaran yang terdapat didalam Renstra Kominfo periode 2023 – 2026.

2.2.4 Persentase Aplikasi yang mendukung Pelayanan Publik

Persentase Aplikasi yang mendukung Pelayanan Publik dengan target Tahun 2023 sebesar 40 % dan realisasi sebesar 75,00 % dilihat dari realisasi capaian Indikator untuk Tahun 2023 tersebut, realiasi Tahun 2023 suda bisa melebihi capaian Target Indikator yang telah ditentukan pada Tahun 2023, ini dikarenakan sudah tersedianya anggaran yang mendukung dari capaian indikator ini, Jumlah SDM yang sudah lumayan Cukup di Bidang TIK, Kualitas SDM yang sudah Meningkat dikarenakan sudah banyak yang mengikuti Bimtek – bimtek baik secara online maupun tatap muka, sudah meningkatnya koordinasi dengan Dinas – dinas terkait, sudah banyak dinas – dinas yang sudah memahami terkait pentingnya Teknologi Informasi dan komunikasi dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi masing – masing Dinas terkait, Kemudian untuk Proyeksi realisasi capaian Indikator

Tahun 2024 tidak mengalami peningkatan dari tahun 2023, tetapi untuk capaiannya sudah melebihi dari target yang ditentukan didalam Renstra Diskominfo Tahun 2023 – 2026. Untuk tahun 2023 targetnya sebesar 40 % dengan realisasi sebesar 75 %, tahun 2024 target sebesar 60 % dengan realisasi proyeksi juga sama sama dengan tahun 2023 sebesar 75 %, tahun 2025 target sebesar 80 % dengan realisasi Proyeksi sebesar 75,00 % dan untuk tahun 2026 dengan target sebesar 100 % dengan realisasi proyeksi sebesar 75 % sesuai dengan tahun 2025. Dilihat dari target dan realisasin capaiannya dari indikator sasaran ini untuk tahun 2025 dan 2026 proyeksi realisasinya tidak tercapai. Dan untuk indikator kinerja ini merupakan indikator Sasaran yang terdapat didalam Renstra Kominfo 2023 – 2026.

2.2.5 Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo

Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo dengan target Tahun 2023 sebesar 26,31 % dan realisasi sebesar 2,63 % dilihat dari realisasi capaian Indikator untuk Tahun 2023 tersebut, realiasi Tahun 2023 belum bisa mencapai Target Indikator yang telah ditentukan pada Tahun 2023, ini dikarenakan masih kurangnya Anggaran yang mendukung dari capaian indikator ini, masih kurangnya pemahaman terkait pentingnya indikator ini dalam pencapaian nilai Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Landak sehingga Dinas – dinas masih menganggap sendiri dan mengelola sendiri terkait akses internet di Dinas Masing – masing, masih kurangnya SDM yang berkompeten, masih kurangnya koordinasi dengan Dinas – dinas terkait, masih banyak dinas – dinas yang belum memahami terkait pentingnya Internet satu Pintu yang dikelola oleh Diskominfo, Kemudian untuk Proyeksi realisasi capaian Indikator Tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun 2023, walaupun secara capaian masih jauh dari target yang telah ditetapkan didalam Renstra 2023 – 2026 Dinas Kominfo dimana untuk tahun 2023 target sebesar 26,31 % dengan realisasi sebesar 2,63 %, untuk tahun 2024 target sebesar 52,63 % dengan proyeksi realisasi sebesar 5 %, untuk

tahun 2025 target sebesar 92,10 % dengan realisasi proyeksi sebesar 5 % ini dikarenakan belum tersedianya anggaran untuk mendukung dari indikator ini , kemudian untuk tahun 2026 dengan target 100% dengan realiasi proyeksi sebesar 5 % sama dengan realisasi proyeksi tahun 2025 hal ini dikarenakan adanya kemungkinan efisiensi anggaran di tahun 2026 sehingga realisasi proyeksinya sebesar 5 %. Dan untuk indikator kinerja ini merupakan indikator Sasaran yang terdapat didalam Renstra Kominfo 2023 – 2026.

2.2.6 Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi

Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi dengan target Tahun 2023 sebesar 85 % dan realisasi sebesar 87,50 % dilihat dari realisasi capaian Indikator untuk Tahun 2023 tersebut, realiasi Tahun 2023 sudah bisa melebihi capaian Target Indikator yang telah ditentukan pada Tahun 2023, ini dikarenakan sudah tersedianya Anggaran yang mendukung dari capaian indikator ini walaupun masih dianggarkan oleh Dinas masing - masing, Sudah tersedianya SDM yang lumayan cukup, sudah meningkatnya pemahaman Dinas, terkait pentingnya layanan publik yang diselenggaran secara online dan terintegrasi Kemudian untuk Proyeksi realisasi capaian Indikator Tahun 2024 tidak mengalami peningkatan dari tahun, dimana untuk tahun 2023 target sebesar 85 % dengan realisasi sebesar 87,50 %, untuk tahun 2024 dengan target sebesar 87 % dengan proyeksi realisasi sebesar 87,50 %, akan tetapi secara capaian untuk indikator ini ditahun 2023 dan 2024 melebihi dari target yang ditentukan, untuk tahun 2025 dengan target sebesar 89 % dan realisasi proyeksi sebesar 87,50 % untuk realisasi proyeksi capaian ini tidak mengalami kenaikan dikarenakan tidak cukup anggaran untuk mendukung dari indikator ini, kemudian untuk tahun 2026 dengan target sebesar 92 % dan dengan Realisasi Proyeksi juga sama sebesar 87,50 % hal ini dikarenakan akan adanya efisiensi anggaran di tahun 2026, jadi realisasi proyeksinya capaiannya masih samanya dengan tahun 2025. Dan

untuk indikator kinerja ini merupakan indikator Sasaran yang terdapat didalam Renstra Kominfo 2023 – 2026.

2.2.7 Persentase Website yang dikelola oleh Dinas Kominfo

Persentase Website yang dikelola oleh Dinas Kominfo Kabupaten Landak dengan target Tahun 2023 sebesar 25 % dan realisasi sebesar 3,93 % dilihat dari realisasi capaian Indikator untuk Tahun 2023 tersebut, realiasi Tahun 2023 belum bisa mencapai Target Indikator yang telah ditentukan pada Tahun 2023, ini dikarenakan masih kurangnya Anggaran yang mendukung dari capaian indikator ini, kurangnya SDM yang berkompeten, kurangnya koordinasi dengan Dinas – dinas terkait, masih banyak dinas – dinas yang belum memahami terkait pentingnya Websiste yang dikelola oleh Dinas Kominfo untuk penilaian Indeks SPBE di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak, Dinas – dinas masih menganggarkan masing – masing terkait pembuatan dan pengelolaan website dinasnya di DPA masing – masing Dinas, masih kurangnya dukungan dari stakeholder terkait website yang dikelola oleh Diskominfo serta masih kurangnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung dari tercapainya indikator ini, Kemudian untuk Proyeksi realisasi capaian Indikator Tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun 2023 walaupun secara capaian target untuk tahun 2023 realisasinya belum mencapai target yang ditentukan sementara untuk tahun 2024 realisasinya sudah melebihi dari target yang ditentukan, untuk tahun 2023 dengan target 25 % dengan realisasi sebesar 3,93 %, Tahun 2024 dengan target 50 % dan realisasi Proyeksi sebesar 83,3 % , untuk tahun 2025 dengan target sebesar 75 % dengan realisasi proyeksi sebesar 83,3 % hal ini dikarenakan untuk tahun 2025 tidak tersedianya anggaran untuk mencapai dari target indikator ini kemudian untuk tahun 2026 dengan target sebesar 100 % dan realisasi proyeksinya sebesar 83,3 % sama dengan realisasi proyeksi untuk tahun 2025, hal ini dikarenakan untuk tahun 2026 akan terjadi efisiensi anggaran sehingga kemungkinan tidak tersedia anggaran untuk mencapai target dari indikator ini. Dan untuk indikator kinerja ini merupakan indikator Sasaran yang terdapat didalam Renstra Kominfo 2023 – 2026.

2.2.8 Persentase Website yang sudah dikembangkan oleh Diskominfo

Persentase Website yang sudah dikembangkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Landak dengan target Tahun 2023 sebesar 25 % dan realisasi sebesar 3,93 % dilihat dari realisasi capaian Indikator untuk Tahun 2023 tersebut, realiasi Tahun 2023 belum bisa mencapai Target Indikator yang telah ditentukan pada Tahun 2023, ini dikarenakan masih kurangnya Anggaran yang mendukung dari capaian indikator ini, kurangnya SDM yang berkompeten, kurangnya koordinasi dengan Dinas – dinas terkait, masih banyak dinas – dinas yang belum memahami terkait pentingnya Websiste yang dikelola oleh Dinas Kominfo untuk penilaian Indeks SPBE di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak, Dinas – dinas masih menganggarkan masing – masing terkait pembuatan dan pengelolaan website dinasnya di DPA masing – masing Dinas, masih kurangnya dukungan dari stakeholder terkait website yang dikelola oleh Diskominfo serta masih kurangnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung dari tercapainya indikator ini, Kemudian untuk Proyeksi realisasi capaian Indikator Tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun 2023 walaupun secara capaian target untuk tahun 2023 realisasinya belum mencapai target yang ditentukan sementara untuk tahun 2024 realisasinya sudah melebihi dari target yang ditentukan, untuk tahun 2023 dengan target 25 % dengan realisasi sebesar 3,93 %, Tahun 2024 dengan target 50 % dan realisasi Proyeksi sebesar 83,3 % , untuk tahun 2025 dengan target sebesar 75 % dengan realisasi proyeksi sebesar 83,3 % hal ini dikarenakan untuk tahun 2025 tidak tersedianya anggaran untuk mencapai dari target indikator ini kemudian untuk tahun 2026 dengan target sebesar 100 % dan realisasi proyeksinya sebesar 83,3 % sama dengan realisasi proyeksi untuk tahun 2025, hal ini dikarenakan untuk tahun 2026 akan terjadi efisiensi anggaran sehingga kemungkinan tidak tersedia anggaran untuk mencapai target dari indikator ini. Dan untuk indikator kinerja ini merupakan indikator Sasaran yang terdapat didalam Renstra Kominfo 2023 – 2026.

2.2.9 Jumlah SPBE yang dibangun dan dikembangkan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik. Jumlah SPBE yang dibangun dan dikembangkan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan target Tahun 2023 sebesar 71,00 % dan realisasi sebesar 74,00 % dilihat dari realisasi capaian Indikator kinerja untuk Tahun 2023 tersebut, realiasi capaian Tahun 2023 sudah bisa mencapai Target Indikator yang telah ditentukan pada Tahun 2023, ini dikarenakan sudah tersedianya Anggaran yang mendukung dari capaian indikator ini walaupun penganggaran masih di DPA Dinas masing - masing, sudah tersedianya SDM yang cukup berkompeten, adanya konsultasi dan koordinasi dengan Dinas – dinas terkait, sudah meningkatnya pemahaman dinas – dinas, terkait pentingnya SPBE untuk penilaian Indeks SPBE di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak, sudah adanya dukungan dari stakeholder terkait pentingnya SPBE dalam tercapainya indikator ini, Kemudian untuk Proyeksi realisasi capaian Indikator Tahun 2024 tidak mengalami peningkatan dari tahun 2023 yaitu sebesar 74 % walaupun secara capaian untuk capaian realisasinya sudah melebihi dari target yang telah ditentukan hal ini dikarenakan masih kurangnya Ketersediaan anggaran dan Sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung dari capaian indikator kinerja ini, dimana target untuk tahun 2023 sebesar 71 % dengan realisasi sebesar 74 %, untuk tahun 2024 dengan target sebesar 73 % dengan proyeksi realisasi sebesar 74 % sama dengan tahun 2023, kemudian untuk tahun 2025 dengan target sebesar 75 % dan realisasi proyeksi sama dengan target sebesar 75 % dan untuk tahun 2026 dengan target sebesar 77 % dengan realisasi proyeksi sebesar 77 % hal ini dikarenakan untuk tahun 2025 – 2026 indikator ini menjadi fokus kepala daerah terpilih periode 2025 – 2029 dan diharapkan realisasi riilnya bisa melebihi dari target yang telah ditetapkan. Dan untuk indikator kinerja ini merupakan indikator sasaran yang terdapat di RPD Tahun 2023 – 2026 dan Indikator Tujuan yang terdapat didalam Renstra Kominfo 2023 – 2026.

2.2.10 Persentase ketersediaan Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Persentase ketersediaan Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk tahun 2023 dengan target sebesar 28,57 dan realisasi sebesar 0 %, hal ini dikarenakan tidak tersedianya data terkait indikator ini untuk tahun 2023, untuk tahun 2024 dengan target 42,86 % dengan realisasi Proyeksi sebesar 10,00 %, hal ini dikarenakan sudah tersedianya Rencana kerja Anggaran untuk mendukung indikator ini walaupun anggaran yang tersedia masih sangat kecil untuk mencapai target dari indikator kinerja ini di tahun 2024, untuk tahun 2025 dengan target 57,14 % realisasi proyeksi sebesar 28,57 % kemudian untuk tahun 2026 dengan target sebesar 71,43 % dengan realisasi proyeksi sebesar 42,86 % realisasi proyeksi ini dikarenakan untuk tahun 2025 – 2026 kepala Daerah terpilih menjadikan indikator ini fokus didalam RPJMD periode 2025 -2029 sehingga kemungkinan akan adanya dukungan anggaran untuk pencapaian indikator ini dan kemungkinan SDM juga akan meningkat dikarenakan tersedianya anggaran untuk peningkatan kualitas SDM. Dan untuk indikator kinerja ini merupakan indikator Tujuan yang terdapat di RPD 2023 – 2026 dan Indikator Sasaran yang terdapat didalam Renstra Kominfo 2023 – 2026.

2.2.11 Jumlah Website yang dikelola dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah

Jumlah Website yang dikelola dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah dari tahun 2023 sampai dengan proyeksi tahun 2024, 2025 dan 2026 tidak mengalami peningkatan akan tetapi secara target Indikator ini realisasinya telah lebih dari target yang ditentukan dimana tahun 2023 dengan target sebesar 45 % dengan realisasi sebesar 74 %, untuk tahun 2024 dengan target 47 % dan proyeksi realisasi sebesar 74 %, kemudian untuk tahun 2025 dengan target 49 % dan realisasi proyeksi sebesar 74 %, untuk tahun 2026 dengan target 51 % dan realisasi proyeksi

sebesar 74% sama dengan tahun 2025 hal ini dikarenakan Website – Websiste perangkat Daerah masih banyak yang dikelola dan dikembangkan oleh Perangkat Daerah Masing – masing, diharapkan kedepannya Website – Website Perangkat Daerah akan dikelola dan dikembangkan satu Pintu Oleh Dinas Kominfo. Dan untuk indikator kinerja ini merupakan indikator Tujuan yang terdapat di RPD 2023 – 2026 dan Indikator Sasaran yang terdapat didalam Renstra Kominfo 2023 – 2026. Dengan meningkatnya Website yang dikelola dan dikembangkan oleh Dinas kominfo diharapkan bisa meningkatkan Nilai Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Landak Kedepannya.

2.2.12 Menurunnya Desa Non Sinyal (Blank spot) Area

Menurunnya Desa Non Sinyal (Blank Spot) Area untuk tahun 2023 sampai dengan proyeksi tahun 2024 tidak mengalami peningkatan dimana tahun 2023 target 26 desa dengan realisasi 28 Desa, untuk tahun 2024 target 28 desa dengan proyeksi realisasi 28 desa, hal ini dikarenakan tidak ada rencana pembangunan infrastruktur di tahun 2024 baik dari bhakti kemen kominfo maupun dari pihak vendor atau pihak ketiga walaupun dinas kominfo sudah berusaha untuk menyampaikan usulan terkait infrastruktur di bhakti kemenkominfo dan juga berusaha koordinasi dengan pihak vendor atau pihak ketiga agar mau membangun infrastruktur di Kabupaten Landak, untuk tahun 2025 dengan target 22 Desa dengan realisasi proyeksi sebesar 28 Desa, kemudian untuk tahun 2026 dengan target 20 Desa dengan realisasi proyeksi sebesar 28 Desa, sama dengan realisasi tahun – tahun sebelumnya hal ini dikarenakan masih belum cukupnya ketersediaan anggaran untuk mencapai indikator kinerja ini dan belum memadainya kualitas SDM di Bidang TIK, kemudian karena adanya efisiensi anggaran dari tahun 2023 dan kemungkinan sampai dengan tahun 2026 sehingga menara Bhakti yang dibangun di Kabupaten Landak banyak yang belum bisa diaktifkan. Dan untuk indikator kinerja ini merupakan indikator Sasaran di RPD 2023 – 2026 dan Indikator Tujuan yang terdapat didalam Renstra Kominfo 2023 – 2026.

2.2.13 Jumlah Infrastruktur Telekomunikasi yang tersedia

Jumlah Infrastruktur Telekomunikasi yang tersedia untuk tahun 2023 sampai dengan proyeksi tahun 2024, tahun 2025 dan tahun 2026 tidak Mengalami peningkatan dan untuk realisasi capaiannya juga belum mencapai target yang telah ditentukan dimana untuk tahun 2023 dengan target 184 Menara dan realisasi sebesar 181 Menara, untuk tahun 2024 target 187 menara dengan proyeksi realisasi sebesar 181 menara, untuk tahun 2025 dengan target 190 Menara dengan proyeksi realisasi sebesar 181 Menara dan untuk tahun 2026 dengan target 193 Menara dengan proyeksi realisasi sebesar 181 Menara sama dengan tahun – tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan belum adanya penambahan pembangunan menara Bhakti di Kabupaten Landak dan belum adanya pembangunan oleh Vendor Swasta yang mengakibatkan tidak adanya penambahan infrastruktur Telakomunikasi sementara untuk membangun sendiri pemerintah kabupaten landak melalui Dinas Kominfo belum memiliki ketersediaan Anggaran. Dan untuk indikator kinerja ini merupakan indikator Sasaran yang terdapat didalam Renstra Kominfo 2023 – 2026.

2.2.14 Persentase ketersediaan Data Statistik Sektoral

Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral dari tahun 2023 sampai dengan proyeksi tahun 2024, Tahun 2025 dan Tahun 2026 tidak mengalami peningkatan akan tetapi untuk indikator ini telah tercapai targetnya dimana untuk tahun 2023 target sebesar 100% dan realisasi sebesar 100%, untuk tahun 2024 dengan target sebesar 100 % proyeksi realisasi sebesar 100 %, sama dengan tahun 2023 kemudian untuk tahun 2025 dan 2026 dengan target sebesar 100 % dan Realisasi proyeksi juga sama 100 % dengan tahun sebelumnya hal ini dikarenakan indikator ini didukung oleh anggaran dan SDM. Dan diharapkan untuk realisasi proyeksi realisasi riilnya bisa melebihi dari target yang telah ditentukan. Salah satu pendukung dari Indikator ini adalah dengan pembuatan Buku Kabupaten Dalam Angka dan

tersedianya portal satu Data Indonesia. Dan untuk indikator kinerja ini merupakan indikator Sasaran di RPD 2023 – 2026 dan Indikator Tujuan yang terdapat didalam Renstra Kominfo 2023 – 2026.

2.2.15 Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam penyusunan perencanaan pembangunan Daerah

Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam penyusunan perencanaan pembangunan Daerah dimana untuk tahun 2023 sampai dengan proyeksi tahun 2024 indikator ini mengalami peningkatan walaupun untuk realisasi capaian target tahun 2023 belum bisa tercapai secara maksimal , hal ini dikarenakan masih belum cukupnya ketersediaan anggaran sehingga pendukung seperti Cetak Buku Landak Dalam angka , dan Cetak Buku PDRB masih belum bisa maksimal, kemudian untuk tahun 2024, tahun 2025 dan tahun 2026 dengan target 100 % dan realisasi proyeksinya juga 100 %, diharapkan tahun 2024, tahun 2025 dan tahun 2026 ketersediaan anggaran tercukupi untuk belanja pendukung tercapainya indikator ini sehingga realisasi capaian dari indikator ini bisa tercapai dengan sangat baik. Dan untuk indikator kinerja ini merupakan indikator Sasaran yang terdapat didalam Renstra Kominfo 2023 – 2026.

2.2.16 Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah

Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan Daerah dimana untuk tahun 2023 sampai dengan proyeksi tahun 2024 indikator ini mengalami peningkatan walaupun untuk realisasi capaian target tahun 2023 belum bisa tercapai secara maksimal , hal ini dikarenakan masih belum cukupnya ketersediaan anggaran sehingga pendukung seperti Cetak Buku Landak Dalam angka , dan Cetak Buku PDRB masih belum bisa maksimal, kemudian untuk tahun 2024, tahun 2025 dan tahun 2026 dengan target 100 % dan realisasi proyeksinya juga 100 %, diharapkan tahun 2024,

tahun 2025 dan tahun 2026 ketersediaan anggaran tercukupi untuk belanja pendukung tercapainya indikator ini sehingga realisasi capaian dari indikator ini bisa tercapai dengan sangat baik. Dan untuk indikator kinerja ini merupakan indikator Sasaran yang terdapat didalam Renstra Kominfo 2023 – 2026.

2.2.17 Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah

Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah untuk indikator ini tidak mengalami peningkatan dari tahun 2023 sampai proyeksi tahun 2024, tahun 2025 dan tahun 2026 dan sementara untuk realisasi capaiannya telah melebihi dari target yang ditentukan, dimana untuk tahun 2023 dengan target 24 % dan realisasi sebesar 28,52 %, untuk tahun 2024 dengan target 24,25 % dengan proyeksi realisasi sebesar 28,51 %, kemudian untuk tahun 2025 dengan target 24,50 dan realisasi proyeksi sebesar 28,51 % begitu juga untuk tahun 2026 dengan target 24,75 % dan realisasi proyeksi sebesar 28,51 %, tidak adanya kenaikan realisasi proyeksi untuk tahun 2023, proyeksi 2024, proyeksi 2025 dan proyeksi 2026 ini dikarenakan untuk tahun 2024 dan tahun 2025 akan terjadinya efisiensi anggaran dan kemungkinan untuk tahun 2026 juga akan mengalami efisiensi anggaran yang lebih besar dari tahun 2024 dan tahun 2025 dan dikurangnya Dana Transfer DAU dari Pemerintah Pusat untuk Pemerintah Daerah. Dan untuk indikator kinerja ini merupakan indikator Sasaran yang terdapat di RPD 2023 – 2026 dan Indikator Tujuan yang terdapat didalam Renstra Kominfo 2023 – 2026.

2.2.18 Persentase Pengamanan Informasi Daerah yang terselenggara dengan baik .

Persentase Pengamanan Informasi Daerah yang terselenggara dengan baik untuk indikator ini tidak mengalami peningkatan dari tahun 2023 sampai proyeksi tahun 2024, tahun 2025 dan tahun 2026 dan sementara untuk realisasi capaiannya telah melebihi dari target yang ditentukan, dimana untuk tahun 2023 dengan target 24 % dan realisasi sebesar 28,52 %, untuk tahun 2024

dengan target 24,25 % dengan proyeksi realisasi sebesar 28,51 %, kemudian untuk tahun 2025 dengan target 24,50 dan realisasi proyeksi sebesar 28,51 % begitu juga untuk tahun 2026 dengan target 24,75 % dan realisasi proyeksi sebesar 28,51 %, tidak adanya kenaikan realisasi proyeksi untuk tahun 2023, proyeksi 2024, proyeksi 2025 dan proyeksi 2026 ini dikarenakan untuk tahun 2024 dan tahun 2025 akan terjadinya efisiensi anggaran dan kemungkinan untuk tahun 2026 juga akan mengalami efisiensi anggaran yang lebih besar dari tahun 2024 dan tahun 2025 dan dikurangnya Dana Transfer DAU dari Pemerintah Pusat untuk Pemerintah Daerah. Dan untuk indikator kinerja ini merupakan indikator Sasaran yang terdapat di RPD 2023 – 2026 dan Indikator Tujuan yang terdapat didalam Renstra Kominfo 2023 – 2026.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1. Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak mempunyai tugas dan tantangan berat di masa depan. Sebagai institusi yang diharapkan mampu menjadi ujung tombak Pengembangan Teknologi Informasi dan mendorong Pemerintahan yang berbasis Elektronik perannya diharapkan menjadi optimal. Banyak tantangan yang dihadapi dan tuntutan yang harus dipenuhi.

Didalam Kondisi sekarang ini , kita dituntut untuk melaksanakan sistem Pemerintahan yang berbasis Elektronik dan diharapkan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak, Pemerintah Daerah bisa menerapkan SPBE dengan sangat baik karena SPBE merupakan amanat yang diperintahkan oleh Pemerintah Pusat dan merupakan salah satu penilaian dalam PMPRB yang dilaksanakan oleh Kemenpan RB setiap tahunnya.

Sumberdaya manusia yang ada di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak yang terdiri atas pejabat struktural dan fungsional merupakan salah satu potensi dalam melaksanakan kebijakan dan program pembangunan bidang Komunikasi dan Informasi serta Statistik dan Persandian,

sekaligus sebagai salah satu faktor yang menentukan dalam meningkatkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak. Namun disadari, bahwa kualitas sumberdaya manusia yang tersedia masih perlu dikembangkan dan dilatih sehingga dapat melaksanakan kebijakan dan program pembangunan secara optimal.

Sarana dan prasarana yang tersedia dalam jumlah tertentu di setiap unit kerja di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak juga memiliki peranan yang cukup menentukan dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan bidang Komunikasi dan Informasi serta Bidang Statistik dan Persandian. Namun, secara kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang tersedia masih sangat terbatas, sehingga pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan tersebut belum dapat dicapai secara optimal, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak.

Berpijak dari hal tersebut di atas, secara lebih jelas identifikasi permasalahan / hambatan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak sesuai tugas dan fungsi pelayanan dapat diuraikan antara lain sebagai berikut :

1. Masih Rendahnya Aplikasi Pelayanan Publik yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Landak ;
2. Serta Masih rendahnya Penerapan Aplikasi Pelayanan Publik pada Pemerintah Daerah Kabupaten Landak ;
3. Terbatasnya Jumlah Peserta Diklat yang disediakan oleh Penyelenggara Diklat dan Pelatihan ;
4. Adanya Biaya Jaya Konsultan dan Penyedia Infrastruktur Teknologi Informasi yang harus disiapkan ;
5. Diperlukan waktu yang cukup lama untuk Implementasi aplikasi umum ;
6. Minimnya jumlah Sumberdaya TIK yang berkompetensi di lingkungan pemerintah Kabupaten Landak
7. Program dan kegiatan TIK yang dilaksanakan oleh instansi teknis belum sinergi ;
8. Belum adanya Jaringan Infrastruktur untuk intra Pemerintah

9. Persentase Website yang sudah dikelola oleh Diskominfo Kabupaten Landak masih sangat rendah ;
10. Persentase Website yang sudah dikembangkan oleh Diskominfo Kabupaten Landak Masih Sangat rendah ;
11. Belum Optimalnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan secara teknis (keahlian atau kompetensi) Sandiman;
12. Belum Optimalnya layanan keamanan Informasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah berbasis Elektronik ;
13. Semakin banyaknya masyarakat menggunakan internet dimana masyarakat perlu dibekali dengan kemampuan dalam menangkal informasi hoax. Penyebaran berita melalui media sosial sangat mudah dan viral, terjadi tanpa memastikan kebenarannya ;
14. Keterbukaan Informasi Publik dalam penyelenggaraan pemerintahan oleh perangkat daerah masih perlu ditingkatkan untuk mengimplentasikan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
15. Perlu peningkatan sarana maupun prasarana, SDM yang berkompeten sebagai penunjang bagi optimalisasi kinerja khususnya dalam pengelolaan layanan informasi dan komunikasi publik ;
16. Belum Optimalnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan secara teknis (keahlian atau kompetensi) statistisi yang berkualifikasi ;
17. Belum diterapkannya layanan satu data ;
18. Proses Identifikasi Pengajuan Proposal Pembangunan Menara yang tidak mudah ;
19. Terbatasnya Jumlah Infrastruktur dan Jaringan Telekomunikasi yang disediakan oleh Kementerian Kominfo Melalui BHAKTI dalam Pembangunan di Daerah ;
20. Letak Menara Telekomunikasi yang jauh sehingga harus memiliki cukup SDM dalam pengawasan Menara Telekomunikasi ;

2.3.2. Identifikasi Permasalahan/Hambatan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Identifikasi permasalahan, tugas dan fungsi pelayanan digunakan untuk menentukan program dan kegiatan fungsi pelayanan OPD yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu harus dilakukan sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pelayanan kepada masyarakat. Kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diangkat adalah:

1. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diutamakan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang.
2. Suatu kondisi yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, atau suatu kondisi/keadaan yang apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kualitas layanan.

Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan hasil review pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Landak Tahun 2023 dapat dikatakan bahwa kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak telah berlangsung cukup baik. Namun sebagaimana umumnya yang terjadi dalam pelayanan IT di Pemerintah Daerah Kabupaten Landak masih banyak yang harus diperbaiki dan dikembnagkan terkait dengan SPBE. Pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi skala prioritas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak dalam jangka menengah dan panjang, yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, disamping itu peningkatan fasilitas pendukung informasi dan komunikasi melalui media teknologi (Media Center) dan pengembangan keterbukaan informasi publik akan memberikan nilai tambah bagi peningkatan sumber daya aparatur dalam pelaksanaan

tugas – tugas pemerintahan dan kompetensi yang dapat merancang, menggunakan, dan mengevaluasi pelayanan kepada masyarakat di berbagai lintas sektoral, melalui sumberdaya manusia yang metode komunikasi, pemanfaatan informasi dan teknologi pendukungnya sesuai dengan kemajuan perkembangan teknologi yang ada dengan peningkatan produktivitas, inovasi, dan kolaborasi, tidak hanya dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak saja tetapi juga pada setiap OPD di Kabupaten Landak. Selain hal diatas, terkait dengan statistik dan keamanan informasi juga menjadi point penting dalam penentuan Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak.

Meningkatkan Penerapan teknologi Informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan merupakan salah satu tujuan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak, namun dalam mewujudkan tujuan ini sangat memerlukan dukungan dari seluruh OPD Kabupaten Landak yaitu dengan menyatukan persepsi bahwa pentingnya implementasi Penerapan Teknologi informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Landak atau dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Pentingnya Implementasi e – Government sebagai wujud pelayanan prima Kabupaten Landak. Kurang maksimalnya keterbukaan informasi Publik antar sektor di Lingkungan Pemerintahan Daerah mengakibatkan terbatasnya Koordinasi dan Pengaturan sehingga menyulitkan penyelarasan Pembangunan Teknologi Informasi di Kabupaten Landak. Terkait dengan hal diatas Penyelenggaraan Keamanan Informasi juga sangat penting dalam penerapan e – Government di Pemerintahan Kabupaten Landak, Selain itu statistik juga memiliki peranan penting dalam penyediaan Data yang dapat dimanfaatkan sebagai Dasar Pembangunan.

Berdasarkan identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak, dapat dirumuskan beberapa isu strategis terkait Teknologi Informasi dan Komunikasi, Kehumasan ,

Statistik dan Persandian Kabupaten Landak. Penentuan isu strategis menjadi bagian penting bagi keseluruhan penyusunan Rencana Kerja satu tahun.

Berdasarkan hasil analisis terhadap hal-hal yang telah dikemukakan sebelumnya, serta dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dalam menentukan isu strategis, maka dapat diidentifikasi isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak sebagai berikut:

1. Meningkatkan Aplikasi Pelayanan Publik yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Landak ;
2. Meningkatkan Penerapan Aplikasi Pelayanan Publik pada Pemerintah Daerah Kabupaten Landak
3. Adanya Kebijakan Pelaksanaan Mutasi dan Perubahan SOTK ;
4. Pengelolaan sumber Daya Teknologi Informasi yang belum terpusat di Dinas Kominfo ;
5. Tersedianya Jabatan Fungsional ;
6. Kemungkinan Pengalihan Pembangunan antar Daerah ;
7. Pembangunan Jaringan infrastruktur untuk intra Pemerintah ;
8. Meningkatkan Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Website Oleh Diskominfo Kabupaten Landak ;
9. Belum Optimalnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan secara teknis (keahlian atau kompetensi) Sandiman;
10. Belum Optimalnya layanan keamanan Informasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah berbasis Elektronik
11. Peningkatan penyebaran informasi publik ;
12. Meningkatkan Keterbukaan Informasi kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Landak ;
13. Pembinaan Lembaga Media Lokal ;
14. Meningkatkan sarana maupun prasarana, SDM yang berkompeten sebagai penunjang bagi optimalisasi kinerja khususnya dalam pengelolaan layanan informasi dan komunikasi publik ;
15. Peningkatan pengembangan komunikasi, informasi dan media massa ;

16. Belum Optimalnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kemampuan secara teknis (keahlian atau kompetensi) statistisi yang berkualifikasi ;
17. Belum diterapkannya layanan satu data ;
18. Adanya Kebijakan Pemerintah Pusat dalam memberikan bantuan pembangunan Menara di Daerah ;
19. Peningkatan Infrastruktur Sarana dan Prasarana telekomunikasi dan sebaran yang merata diseluruh Wilayah Kabupaten Landak termasuk didesa ;
20. Peningkatan Pemerataan Pembangunan Menara Telekomunikasi di Wilayah Kabupaten Landak ;
21. Meningkatkan Pemetaan Jaringan Komunikasi dan Wilayah Blankspot;
22. Meningkatkan jumlah SDM yang berkompeten di Bidang TIK ;

2.3.3. Dampak terhadap Visi dan Misi Bupati dan Terhadap Capaian Program Nasional

Capaian dari program dan kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak mendorong tercapainya Tujuan dan Sasaran yang terdapat di RPD Pemerintah Kabupaten Landak , dimana untuk Tahun 2023 terjadi Kekosongan Kepala Daerah dikarenakan sudah berakhirnya Masa Jabatan Bupati terpilih periode 2017 – 2022 , yang kemudian diangkat Pj Bupati Landak untuk menjabat sementara dalam menjalankan Roda Pemerintahandi Kabupaten Landak sehingga dalam menentukan Tujuan, Sasaran , Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang ada didalam Renstra dan Renja harus sinergi dengan Tujuan dan Sasaran di RPD yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Landak.

Artinya pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak harus bersinergi terhadap tujuan dan Sasaran yang ada di RPD Pemerintah Kabupaten Landak Landak, terhadap pencapaian visi nasional harus mengacu pada Visi dan Misi Presiden dimana visi Nasional dari yaitu Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.

2.3.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak menghadapi beberapa tantangan dan memiliki beberapa peluang terhadap kelancaran tugas pokok yang akan berpengaruh terhadap roda organisasi dalam mencapai tingkat keberhasilannya.

Tantangan atau ancaman yang dihadapi DISKOMINFO Kabupaten Landak 2023 – 2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, antara lain :

1. Peningkatan Aplikasi Pelayanan Publik yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Landak ;
2. Peningkatan Penerapan Aplikasi Pelayanan Publik pada Pemerintah Daerah Kabupaten Landak ;
3. Peningkatan Jaringan infrastruktur untuk intra Pemerintah ;
4. Kemampuan dan Keahlian SDM terhadap Teknologi
5. Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan pemerintahan secara menyeluruh ;
6. Infrastruktur Teknologi Informasi yg kurang memadai ;
7. Peningkatan Persentase Pengelolaan dan Pengembangan Website oleh Diskominfo Kabupaten Landak ;
8. Beralihnya tata kelola pemerintah menuju masa digital, miliki potensi mengundang ancaman keamanan. Karena itu, butuh dikerjakan usaha pengamanan aplikasi serta system elektronik, sehingga diperlukan adanya jaminan keamanan system informasi ;
9. Peringkat Keterbukaan Informasi Kabupaten Landak perlu ditingkatkan ;
10. Keterbatasan tenaga teknis yang menguasai teknologi informasi dan komunikasi ;
11. Perlunya Peningkatan Kemampuan SDM di Bidang Humas dan Informasi Publik yang berkualitas ;
12. Data-data statistik sektoral Kabupaten Landak belum terintegrasi dalam satu portal ;

13. Masih lemahnya sistem penyediaan dan pengelolaan data statistik sektoral sehingga tingkat kemutakhiran data dan informasi masih rendah ;
14. Laju Penyebaran informasi perlu diimbangi dengan konten – konten positif untuk menangkal berita hoax maupun ujaran kebencian ;
15. Kurangnya sarana dan prasarana dalam menunjang pengembangan Teknologi, Informasi dan Komunikasi, terutama di daerah Blankspot ;
16. Infrastruktur Jaringan Telekomunikasi yang belum merata di setiap Desa ;

Disamping tantangan yang sudah disebutkan di atas , DISKOMINFO juga memiliki beberapa peluang yang diharapkan dapat dibaca sebagai kesempatan pengembangan organisasi kedepan. Peluang yang harus dioptimalkan oleh DISKOMINFO dalam melaksanakan tugas dan fungsi 1 (Tahun) tahun yang akan datang, antara lain :

1. Adanya Aplikasi Layanan Publik dan Penerapan di Pemerintah Daerah Kabupaten Landak Walaupun Masih Sangat Rendah ;
2. Tersedia Diklat atau pelatihan – pelatihan dibidang Teknologi Informasi yang dilaksanakan oleh lembaga Pemerintah dan Swasta ;
3. Tersedianya Penyedia Jaringan Telekomunikasi ;
4. Tersedianya Aplikasi umum dalam penyelenggaraan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat ;
5. Hasil evaluasi SPBE, Landak mendapatkan indeks SPBE 2,36 Predikat CUKUP ;
6. Sudah Tersedianya Website di Pemerintah Kabupaten Landak
7. Untuk menghadapi tantangan keamanan informasi perlu adanya Penyelenggaraan Persandian untuk keamanan informasi.
8. Peringkat Keterbukaan Informasi Pemerintah Kabupaten Landak masuk dalam Zona Hijau pada tahun 2021 ;
9. Teknologi, Informasi dan Komunikasi berkembang sangat cepat ;

10. Tersedianya akun – akun media sosial Instansi pemerintah daerah sebagai media untuk memproduksi dan menyebarkan konten – konten positif untuk mengimbangi konten – konten negatif dalam rangka menangkal berita hoax maupun ujaran kebencian ;
11. Peranan media semakin diperkuat dengan perkembangan teknologi dan jejaring sosial.
12. Perkembangan teknologi mempermudah pengintegrasian satu data statistik ;
13. Pembangunan Menara KPUSO di wilayah blankspot terus diusulkan setiap tahun dibangun di daerah Blankspot ;
14. Tersedianya bantuan infrastruktur telekomunikasi dari Pemerintah Pusat ;

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam RKPD Tahun 2025 terhadap kebutuhan dapat dilihat pada Tabel. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa semua program dan kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD, hal ini disebabkan karena program dan kegiatan telah sesuai dengan kebutuhan. Dan untuk besaran anggaran yang diajukan juga telah sesuai dengan kebutuhan yang diajukan, sebagaimana terlihat pada tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Landak

Rancangan Awal SKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7)	(8)	9)	(10)	11)	(12)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				5.879.987.200,00	URUSAN PEMERINTAHAN AJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				5.879.987.200,00	
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				5.629.987.500,00	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				5.629.987.500,00	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Kab. Landak	Indeks Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan (IK-PUP)	100%	4.479.995.192,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Kab. Landak	Indeks Kinerja Penunjang Urusan Pemerintahan (IK-PUP)	100%	4.479.995.192,00	
2.16.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Diskom info Kab. Landak	Jumlah Dokumen Renstra-PD , Renja-PD, RKA-SKPD, DPA-SKPD, LAKIP-PD dan evaluasi renja	8 Dokumen	58.836.200,00	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Diskominfo Kab. Landak	Jumlah Dokumen Renstra-PD , Renja-PD, RKA-SKPD, DPA-SKPD, LAKIP-PD dan evaluasi renja	8 Dokumen	58.836.200,00	

2.16.01. 2.01.00 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Diskomi nfo Kab. Landak	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dok.	13.406.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Diskomi nfo Kab. Landak	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	13.406.000,00	
2.16.01. 2.01.00 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Diskomi nfo Kab. Landak	Jumlah Dokumen RKA – SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	1 Dok.	8.695.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Diskomi nfo Kab. Landak	Jumlah Dokumen RKA – SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	1 Dokumen	8.695.000,00	
2.16.01. 2.01.00 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Diskomi nfo Kab. Landak	Jumlah Dokumen Perubahan RKA –SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA – SKPD	3 Dok.	0.00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	Diskomi nfo Kab. Landak	Jumlah Dokumen Perubahan RKA –SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	3 Dokumen	0.00	
2.16.01. 2.01.00 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Diskomi nfo Kab. Landak	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	1 Dok.	8.237.900,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA – SKPD	Diskomi nfo Kab. Landak	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	8.237.900,00	
2.16.01. 2.01.00 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Diskomi nfo Kab. Landak	Jumlah DokumenPerubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	3 Dok.	0.00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Diskomi nfo Kab. Landak	Jumlah DokumenPerubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 Dokumen	0.00	
2.16.01. 2.01.00 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Diskomi nfo Kab. Landak	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Lap.	14.394.800,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Diskomi nfo Kab. Landak	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	14.394.800,00	
2.16.01. 2.01.00 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Diskomi nfo Kab. Landak	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Lap.	14.101.600,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Diskomi nfo Kab. Landak	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	14.101.600,00	
2.16.01 .2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Diskom info Kab. Landak	Jumlah Laporan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah	12 Lap.	4.183.283.918,00	Kegiatan Administrasi Keuangan Pangkat Daerah	Diskomi nfo Kab. Landak	Jumlah Laporan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah	12 Lap.	4.183.283.918,00	

2.16.01. 2.02.00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Diskomi nfo Kab. Landak	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 Orang /bulan	4.143.561.142,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Diskomi nfo Kab. Landak	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	49 Orang/bulan	4.143.561.142,00	
2.16.01. 2.02.00 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Diskomi nfo Kab. Landak	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7 lap.	18.267.576,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Diskomi nfo Kab. Landak	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7 laporan	18.267.576,00	
2.16.01. 2.02.00 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Diskomi nfo Kab. Landak	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	240 Dok.	0.00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Diskomi nfo Kab. Landak	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	240 Dokumen	0.00	
2.16.01. 2.02.00 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Diskomi nfo Kab. Landak	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 lap.	10.138.500,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Diskomi nfo Kab. Landak	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 laporan	10.138.500,00	
2.16.01. 2.02.00 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulnan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Diskomi nfo Kab. Landak	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	30 Lap.	11.316.700,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulnan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Diskomi nfo Kab. Landak	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	30 Laporan	11.316.700,00	
2.16.01. 2.02.00 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi anggaran	Diskomi nfo Kab. Landak	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dok.	0.00	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi anggaran	Diskomi nfo Kab. Landak	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	0.00	
2.16.01 .2.03	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Diskom info Kab. Landak	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	9 Lap.	0.00	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Diskomi nfo Kab. Landak	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	9 Lap.	0.00	
2.16.01. 2.03.00 01	Penyusun Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Diskomi nfo Kab. Landak	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dok.	0.00	Penyusun Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Diskomi nfo Kab. Landak	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	0.00	
2.16.01. 2.03.00 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Diskomi nfo Kab. Landak	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Lap.	0.00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Diskomi nfo Kab. Landak	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	0.00	

2.16.01. 2.03.00 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Diskomi nfo Kab. Landak	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Lap.	0.00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Diskomi nfo Kab. Landak	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	0.00	
2.16.01 .2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Diskom info Kab. Landak	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8 Lap.	0.00	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Diskomi nfo Kab. Landak	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8 lap.	0.00	
2.16.01. 2.05.00 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Diskomi nfo Kab. Landak	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dok.	0.00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Diskomi nfo Kab. Landak	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	0.00	
2.16.01. 2.05.00 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Diskomi nfo Kab. Landak	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dok.	0.00	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Diskomi nfo Kab. Landak	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	0.00	
2.16.01 .2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Diskom info Kab. Landak	Jumlah Fasilitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	14 Keg.	120.184.374,00	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Diskomi nfo Kab. Landak	Jumlah Fasilitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	14 Keg.	120.184.374,00	
2.16.01. 2.06.00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Diskomi nfo Kab. Landak	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.957.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Diskomi nfo Kab. Landak	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.957.000,00	
2.16.01. 2.06.00 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Diskomi nfo Kab. Landak	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.813.400,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Diskomi nfo Kab. Landak	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	30.813.400,00	
2.16.01. 2.06.00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Diskomi nfo Kab. Landak	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.748.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Diskomi nfo Kab. Landak	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	7.748.000,00	
2.16.01. 2.06.00 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Diskomi nfo Kab. Landak	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	21.329.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Diskomi nfo Kab. Landak	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	21.329.000,00	

2.16.01. 2.06.00 07	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Diskomi nfo Kab. Landak	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3800 Doku men	0.00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Diskomi nfo Kab. Landak	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3800 Dokumen	0.00	
2.16.01. 2.06.00 07	Penyediaan Bahan/Material	Diskomi nfo Kab. Landak	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	0.00	Penyediaan Bahan/Material	Diskomi nfo Kab. Landak	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	0.00	
2.16.01. 2.06.00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Diskomi nfo Kab. Landak	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Lap.	55.336.974,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Diskomi nfo Kab. Landak	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	55.336.974,00	
2.16.01. 2.06.00 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Diskomi nfo Kab. Landak	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dok.	0.00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Diskomi nfo Kab. Landak	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	0.00	
2.16.01 .2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Diskom info Kab. Landak	Presentase Pemenuhan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah	100%	72.416.400,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Diskomi nfo Kab. Landak	Presentase Pemenuhan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah	100%	72.416.400,00	
2.16.01. 2.08.00 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Diskomi nfo Kab. Landak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Lap.	3.690.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Diskomi nfo Kab. Landak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	3.690.000,00	
2.16.01. 2.08.00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Diskomi nfo Kab. Landak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Lapora n	68.726.400,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Diskomi nfo Kab. Landak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	68.726.400,00	
2.16.01. 2.08.00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Diskomi nfo Kab. Landak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Lapora n	0.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Diskomi nfo Kab. Landak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	0.00	
2.16.01 .2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Diskom info Kab. Landak	Presentase Oprasional dan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah	100%	45.275.300,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Diskomi nfo Kab. Landak	Presentase Oprasional dan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah	100%	45.275.300,00	
2.16.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Diskomi	Jumlah Kendaraan Peorangan Dinas atau	10	30.134.200,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Diskomi	Jumlah Kendaraan Peorangan Dinas atau	10 Unit	30.134.200,00	

2.09.00 01	Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	nfo Kab. Landak	Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit		Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	nfo Kab. Landak	Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
2.16.01. 2.09.00 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Diskomi nfo Kab. Landak	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	7.604.800	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Diskomi nfo Kab. Landak	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	7.604.800	
2.16.01. 2.09.00 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Diskomi nfo Kab. Landak	Jumlah Sarana dan Prasaran Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	7.536.300,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Diskomi nfo Kab. Landak	Jumlah Sarana dan Prasaran Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	7.536.300,00	
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Kab. Landak	Persentase Informasi Pembangunan Daerah yang disebarluaskan	60%	899.992.308,00	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Kab. Landak	Persentase Informasi Pembangunan Daerah yang disebarluaskan	60%	899.992.308,00	
			Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	100%				Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	100%		
2.16.02 .2.01	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunkasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Diskom info Kab. Landak	Jumlah Informasi dan Komunikasi Publik pemerintah Daerah yang disebarluaskan	65,00 %	899.992.308,00	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunkasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Diskomi nfo Kab. Landak	Jumlah Informasi dan Komunikasi Publik pemerintah Daerah yang disebarluaskan	65,00%	899.992.308,00	
2.16.02. 2.01.00 15	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Diskomi nfo Kab. Landak	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasi informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	32 Komu nitas	744.435.800,00	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Diskomi nfo Kab. Landak	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasi informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	32 Komunita s	744.435.800,00	
2.16.02. 2.01.00 17	Pelayanan Informasi Publik	Diskomi nfo Kab. Landak	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	2 Pemoh on	117.459.808,00	Pelayanan Informasi Publik	Diskomi nfo Kab. Landak	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	2 Pemohon	117.459.808,00	

2.16.02. 2.01.00 23	Penyusunan Konten	Diskominfo Kab. Landak	Jumlah Konten Informasi Publik	3 Konten	38.096.700,00	Penyusunan Konten	Diskominfo Kab. Landak	Jumlah Konten Informasi Publik	3 Konten	38.096.700,00	
2.16.02. 2.01.00 24	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Diskominfo Kab. Landak	Jumlah ASN bidang Komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	6 Orang	0.00	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Diskominfo Kab. Landak	Jumlah ASN bidang Komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	6 Orang	0.00	
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Kab. Landak	Jumlah Layanan Aplikasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah	71 Unit	250.000.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Kab. Landak	Jumlah Layanan Aplikasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah	71 Unit	250.000.000,00	
2.16.03.2.02	Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo Kab. Landak	Jumlah Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	12 Bulan	250.000.000,00	Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Diskominfo Kab. Landak	Jumlah dokumen pengelolaan nama domain dan subdomain yang terstandarisasi.	12 Bulan	250.000.000,00	
2.16.03. 2.02.00 24	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Diskominfo Kab. Landak	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	10 Aplikasi	129.118.000,00	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Diskominfo Kab. Landak	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	10 Aplikasi	129.118.000,00	
2.16.03. 2.02.00 24	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Diskominfo Kab. Landak	Jumlah Perangkat Daerah di Pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	1 Perangkat Daerah	120. 882.000,00	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Diskominfo Kab. Landak	Jumlah Perangkat Daerah di Pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	1 Perangkat Daerah	120. 882.000,00	
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					

2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Kab. Landak	Nilai Domain Kegiatan Statistik Sektoral	80%	124.999.700,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Kab. Landak	Nilai Domain Kegiatan Statistik Sektoral	80%	124.999.700,00	
2.20.02 .2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Diskom info Kab. Landak	Nilai Aspek Kegiatan Statistik Sektoral	80%	124.999.700,00	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Diskomi nfo Kab. Landak	Nilai Aspek Kegiatan Statistik Sektoral	80%	124.999.700,00	
2.20.02. 2.01.00 07	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Diskomi nfo Kab. Landak	Jumlah Pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	2 Orang	49.999.2000,00	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Diskomi nfo Kab. Landak	Jumlah Pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	2 Orang	49.999.2000,00	
2.20.02. 2.01.00 08	Peningkatan Peran Statistik Sektoral Terhadap Sistem Statistik Nasional	Diskomi nfo Kab. Landak	Presentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	75 Presen tase	14.897.400,00	Peningkatan Peran Statistik Sektoral Terhadap Sistem Statistik Nasional	Diskomi nfo Kab. Landak	Presentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	75 Presentase	14.897.400,00	
2.20.02. 2.01.00 09	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Diskomi nfo Kab. Landak	Presentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	75 Persen	34.681.900,00	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Diskomi nfo Kab. Landak	Presentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	75 Presentase	34.681.900,00	
2,20,02, 2,01,00 10	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Diskomi nfo Kab. Landak	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	1 Dok.	20.000.000,00	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Diskomi nfo Kab.Lan dak	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	1 Dokumen	20.000.000,00	
2.2002. 2.01.00 11	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Diskomi nfo Kab. Landak	Jumlah statistik sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	1 Dok.	5.421.200,00	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Diskomi nfo Kab. Landak	Jumlah statistik sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	1 Dokumen	5.421.200,00	
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Kab. Landak	Tersedianya Keamanan siber dan sandi pemerintah	60,00 %	125.000.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN	Kab. Landak	Tersedianya Keamanan siber dan sandi pemerintah	60,00%	125.000.000,00	

						INFORMASI					
2.21.02.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Diskom info Kab. Landak	Persentase tingkat maturitas penanganan insiden siber dan sandi	60,00 %	125.000.000,00	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Diskom info Kab. Landak	Persentase tingkat maturitas penanganan insiden siber dan sandi	60,00%	125.000.000,00	
2.21.02.2.01.00 01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Diskom info Kab. Landak	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditetapkan	1 Dok.	0.00	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Diskom info Kab. Landak	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen	0.00	
2.21.02.2.01.00 02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Diskom info Kab. Landak	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	1 Lap.	0.00	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Diskom info Kab. Landak	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	1 Laporan	0.00	
2.21.02.2.01.00 03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Diskom info Kab. Landak	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Lap.	0.00	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Diskom info Kab. Landak	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	0.00	
2.21.02.2.01.00 04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Diskom info Kab. Landak	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	1 PD	125.000.000,00	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Diskom info Kab. Landak	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	1 PD	125.000.000,00	
Jumlah					5.879.987.200,00	Jumlah					

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dengan pertimbangan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik dengan memperhatikan hasil MUSRENBANG mulai dari tingkat desa yang ditindak lanjuti sampai dengan tingkat kabupaten, responsif terhadap permasalahan serta isu-isu strategis, efesien dalam perencanaan anggaran dan efektif dalam pencapaian tujuan. Dengan demikian rencana kerja ini tidak hanya memenuhi kepentingan perangkat daerah saja melainkan juga dapat menjawab permasalahan yang ada di masyarakat khususnya terkait dengan Teknologi, Informasi, Komunikasi , Humas dan Pelayanan Publik, Statistik dan Persandian sepanjang anggaran mampu terakomodir dalam memenuhi sesuai dengan program dan kegiatan.

Usulan kegiatan dari masyarakat yang tertuang dalam rancangan rencana kerja didiskusikan dalam pembahasan forum OPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil musrenbang kecamatan. Berdasarkan hasil musrenbang Kabupaten Landak Tahun 2024, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak , tidak ada usulan dari masyarakat yang berkaitan dengan bidang Komunikasi dan Informatika yang diperuntukan secara Khusus kepada masyarakat yang mana kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika bersifat sebagai OPD Pendukung. Dengan demikian , tidak ada usulan masyarakat yang diusung dalam RENJA Tahun 2025, seperti tersaji dalam Tabel 2.4.

Table 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Landak

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		NIHIL			

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan Program dan Kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak harus merujuk pada sasaran dan kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika, BPS dan BSSN untuk dapat membantu dan mendukung berjalannya seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan serta mewujudkan terciptanya sinkronisasi program dari pusat sampai ke daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak sangat penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional secara keseluruhan. Kebijakan di Bidang Kominfo akan sangat berdampak terhadap kondisi perekonomian nasional, kemudian bidang statistik mempunyai peranan dalam penyediaan data statistik nasional untuk menghasilkan statistik yang mempunyai kebenaran akurat dalam menggambarkan keadaan yang sebenarnya, dalam rangka mendukung indonesia maju dan untuk Bidang Persandian mempunyai peranan penting dalam menyelenggarakan keamanan siber dan persandian secara efektif dan efisien. Untuk itu pembangunan infrastruktur dan SDM dalam bidang Kominfo masih merupakan prioritas nasional dari presiden sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam pengembangan sektor komunikasi dan informatika dalam menghadapi pasar bebas dan persaingan global, sehingga upaya optimal penyediaan infrastruktur melalui pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika yang berkelanjutan guna mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau serta membuka keterisolasian wilayah tertinggal.

Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika, BPS dan BSSN mengacu pada Visi dan Misi Presiden Periode 2020 – 2024. Adapun Visi Kementarian Komunikasi dan Informatika , BPS dan BSSN adalah : “ Indonesia Maju yang berdaulat , Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong – Royong “

Untuk mencapai Visi tersebut maka kementerian Komunikasi dan informatika, BPS dan BSSN mempunyai misi :

3.1.1 Kementerian Koinfo

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia ;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing ;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan ;
4. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa ;
5. Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya ;
dan
6. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Dengan uraian sebagai berikut :

- a. Memberikan Dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat akurat & responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara ;
- b. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan Udara ;
- c. Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang pengawasan, administrasi umum, informasi dan hubungan kelembagaan ; dan
- d. Meningkatkan Kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Komunikasi dan Informatika .

3.1.2 BPS

1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional ;
2. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan ;
3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional ;
4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah .

3.1.3 BSSN

1. Memberikan dukungan teknis dan administrasi serta analisis yang cepat, akurat, dan responsif kepada pemerintah, sebagai bahan pengambilan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan negara dalam rangka mewujudkan kedaulatan siber indonesia berkelas dunia ;
2. Menyelenggarakan Keamanan siber dan persandian secara efektif dan efisien ;
3. Meningkatkan Kualitas Sumber daya BSSN

Dalam rencana strategis Kementerian Kominfo Tahun 2020 – 2024 , pembangunan bidang komunikasi dan informatika lima tahun kedepan diprioritaskan pada upaya mengembangkan ekosistem digital nasional yang mendukung visi dan misi preseiden serta fokus pembangunan pemerintah , dengan fokus utama yaitu pemerataan infrastruktur TIK, percepatan transformasi digital, dan pengelolaan komunikasi publik, berikut Tujuan dari Kementerian Kominfo, BPS dan BSSN :

A. Tujuan Kementerian Kominfo

1. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah indonesia;
2. Mendorong percepatan transformasi digital di 3 aspek, bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital
3. Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan Komunikasi Publik.

B. Tujuan BPS

Tujuan 1: Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan, terkait dengan Misi ke-1: Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional;

Tujuan 2: Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN, terkait dengan Misi ke-2: Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan;

Tujuan 3: Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN, terkait dengan Misi ke-3: Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional; dan

Tujuan 4: Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi, terkait dengan: Misi ke-4: Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah.

C. Tujuan BSSN

1. Terwujudnya kedaulatan keamanan siber Indonesia ;
2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di BSSN ;

Adapun sasaran strategis pembangunan di Bidang Komunikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik dan Persandian meliputi, sebagai berikut :

A. Sasaran Kementerian Kominfo

1. Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau ;
2. Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital ;
3. Meningkatnya konektifitas layanan Pos ;
4. Terwujudnya Konektivitas Next Generation Broadband Nasional ;
5. Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika ;
6. Meningkatkan pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis ;
7. Terwujudnya Masyarakat yang cerdas digital ;
8. Dukungan Implementasi digitalisasi Pemerintah ;
9. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik ; dan
10. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

B. Sasaran BPS

Perspektif Stakeholder

Pada perspektif ini merupakan hasil akhir atau dampak yang diharapkan dari seluruh pembangunan statistik, yang diindikasikan dengan:

- a. Meningkatnya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah pusat dan daerah serta swasta, dengan indikator:
 - Meningkatnya harmonisasi kegiatan survei
 - Berkurangnya tumpang tindih kegiatan survei
- b. Meningkatnya hubungan dengan responden dan pengguna data, dengan indikator:
 - Meningkatnya komunikasi dengan responden
 - Meningkatnya perbaikan metode pengumpulan data
 - Sosialisasi kepada masyarakat
 - Memperkuat aturan untuk menjangkau aktivitas bisnis yang berbasis teknologi informasi
 - Meningkatnya jumlah dan kompetensi SDM
 - Membuat customer relationship management
 - Menyusun data mining pengguna data
 - Meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi data
 - Melakukan penyempurnaan pelayanan statistik
 - Meningkatkan berbagai cara komunikasi dengan responden
- c. Meningkatnya sarana dan prasarana, termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik, dengan indikator:
 - Persentase pengunjung BPS yang puas dengan sarana dan prasarana, termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik pada unit pelayanan BPS

- Persentase pegawai BPS yang puas dengan sarana dan prasarana kerja termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik
 - Persentase tersedianya sarana dan prasarana layanan statistik sesuai standar
 - Jumlah satker yang menerapkan smart office termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik
 - Dokumen grand design smart office termasuk yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan statistik
- d. Meningkatnya penggunaan standar dan metodologi internasional di Indonesia, dengan indikator:
- Jumlah standar internasional yang diterapkan dalam sensus/survei
 - Jumlah technical assistance yang dilakukan BPS di NSO
 - Jumlah MOU atau kerjasama BPS dengan internasional
 - Jumlah NSO yang menerima statistical capacity building di BPS
 - Jumlah standar internasional yang diterapkan dalam sensus/survei
- e. Meningkatnya ketersediaan statistik dengan menerapkan standard penjaminan kualitas, dengan indikator:
- Persentase kegiatan statistik yang telah menerapkan standar penjaminan kualitas
 - indeks data statistik yang sesuai dengan dimensi kualitas

2. Perspektif Customer

SS.1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penyediaan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan adalah: Meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas

Dengan indikator sasaran:

- Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional

- Persentase publikasi statistik yang menerapkan standard akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan nasional

SS.2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN adalah: Penguatan statistik sektoral K/L/D/I

Dengan indikator sasaran: Persentase K/L/D/I yang mampu menyelenggarakan statistik sektoral secara mandiri sesuai NSPK

3. Perspektif Internal Process

SS.3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan SSN adalah: Penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN
Dengan indikator sasaran:

- Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik
- Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar

4. Perspektif Learning and Growth

SS.4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi adalah: SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan.

Dengan indikator sasaran:

- Opini BPK atas laporan keuangan BPS
- Persentase kepuasan pengguna data terhadap sarana dan prasarana pelayanan BPS

C. Sasaran BSSN

1. Meningkatnya maturitas keamanan siber di Indonesia ;
2. Terwujudnya penyelenggaraan keamanan siber & sandi yang prima ;
3. Terwujudnya birokrasi BSSN yang bersih, akuntabel, berkinerja tinggi, efektif, efisien dan berorientasi pada pelayanan publik.

Pelaksana dibidang Komunikasi , Informatika, Statistik dan Persandian, baik ditingkat Pusat, Propinsi maupun Kabupaten/Kota bertanggungjawab untuk menghasilkan Rencana Pembangunan Berdasarkan proses perencanaan yang diamanatkan dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan dimaksud dimulai dari tingkat daerah yang melibatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mengintegrasikan, memadukan dan mensinergikan perencanaan antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi, serta mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, dilakukan dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat, serta penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Pembangunan Kabupaten Landak yang Mandiri, Maju dan sejahtera akan terus dilanjutkan pada beberapa tahun mendatang. Alasannya adalah bahwa proses pembangunan akan berlangsung secara dinamis dengan didukung penataan birokrasi yang semakin baik dan berkualitas , penyediaan infrastruktur dasar yang memadai, pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana , dan menjadikan desa sebagai pusat pembangunan, serta peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia telah menjadi komitmen bersama untuk keberlanjutan dan kesinambungan pembangunan Kabupaten Landak 2023 – 2026.

Dalam Upaya kesinambungan pembangunan demikian, maka dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Landak Tahun 2023 – 2026 ditentukan agenda utama pembangunan daerah, yakni sebagai berikut :

1. Pelayanan publik yang semakin baik dan berkualitas ;
2. Peningkatan Infrastruktur dasar untuk pemerataan kesejahteraan ;
3. Pengelolaan sumber daya alam untuk kemandirian ekonomi ;
4. Pusat Pembangunan pada pembangunan desa ;
5. Peningkatan dan Pengembangan kualitas sumber daya manusia .

A. Tujuan RPD

Sebagai arahan bagi pelaksanaan setiap bidang/urusan pemerintahan , maka dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Landak Tahun 2023 – 2026 ditetapkan tujuan – tujuan pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik dan berkualitas ;
2. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar yang memadai ;
3. Meningkatkan kontribusi sumber daya alam bagi perekonomian daerah ;
4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan ;
5. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat .

B. Sasaran RPD

Sejalan dengan tujuan pembangunan yang ada, maka sasaran-sasaran pembangunan Kabupaten Landak Tahun 2023 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik ;
2. Meningkatnya Kualitas Tata kelola Keuangan dan Pendapatan Daerah ;
3. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah ;
4. Meningkatnya Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan ;
5. Meningkatnya profesionalitas ASN dan tata kelola administrasi kepegawaian yang semakin baik dan berkualitas ;
6. Meningkatnya penelitian dan pengembangan untuk mendukung pembangunan dan pengembangan inovasi daerah ;
7. Meningkatnya dukungan layanan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan dan tugas DPRD ;
8. Meningkatnya Pengelolaan arsip Daerah ;
9. Meningkatnya Kualitas pembinaan dan pengawasan internal pemerintah ;
10. Meningkatnya ketersediaan Data statistik Pembangunan yang akurat dan reliabel ;
11. Terwujudnya Peran Persandian dalam pelaksanaan keamanan informasi ;
12. Meningkatnya Kinerja pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil ;
13. Terwujudnya infrastruktur pelayanan dasar yang memadai ;
14. Terwujudnya infrastruktur yang mendukung pengembangan ekonomi dalam kondisi baik ;

15. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup ;
16. Meningkatnya konektivitas dan keselamatan jaringan transportasi
17. Meningkatnya aksesibilitas telekomunikasi dan internet ;
18. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pertanian ;
19. Meningkatnya produktivitas sektor pertanian ;
20. Meningkatnya produksi sektor industri dan perdagangan ;
21. Berkembangnya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
22. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ;
23. Meningkatnya nilai investasi daerah ;
24. Meningkatnya Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
25. Meningkatnya tata kelola pemerintahan Desa yang baik ;
26. Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan kesejahteraan sosial masyarakat di perdesaan ;
27. Meningkatnya cakupan layanan dan kualitas pendidikan ;
28. Meningkatnya kesenian dan Kebudayaan Daerah ;
29. Terwujudnya Pembangunan Literasi dan kegemaran membaca Masyarakat ;
30. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat ;
31. Meningkatnya kesejahteraan sosial ;
32. Meningkatnya kemampuan ekonomi masyarakat ;
33. Meningkatnya pelayanan penyelenggaraan program keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pengendalian penduduk ;
34. Meningkatnya kualitas perlindungan perempuan dan anak ;
35. Meningkatnya kapasitas daerah menuju kabupaten layak anak ;
36. Meningkatnya keterbukaan lapangan kerja ;
37. Meningkatnya ketersediaan pangan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan ;
38. Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangaunan ;
39. Meningkatnya budaya olahraga masyarakat ;
40. Terwujudnya masyarakat tangguh bencana ;
41. Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat ;
42. Meningkatnya pencegahan dan penanganan konflik ;

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintah di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak berperan dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran di RPD (Rencana Pemerintah Daerah) periode 2023 – 2026 yaitu : Tujuan 1 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang semakin baik dan berkualitas ;

Sasaran 4 : Meningkatnya Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan ;

Sasaran 10 : Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Pembangunan yang akurat dan reliabel ;

Sasaran 11 : Terwujudnya Peran persandian dalam pelaksanaan keamanan informasi.

Tujuan 2 : Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar yang memadai ;

Sasaran 17 : Meningkatnya aksesibilitas telekomunikasi dan internet .

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Keberhasilan pembangunan sektor Komunikasi , Informasi , statistik dan persandian merupakan salah satu dalam mempercepat pembangunan daerah. Untuk menunjang keberhasilan pembangunan tersebut maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak sesuai dengan perubahan ke arah perbaikan sistem pembinaan dengan menetapkan Tujuan dan Sasaran yang selaras dengan Tujuan dan Sasaran yang ada di Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023 – 2026 Kabupaten Landak, , serta selaras juga dengan Rencana Strategis Kementerian Kominfo, BPS dan BSSN, 2020 – 2024.

3.2.1. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima)

tahunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang diganti dengan Tujuan dan Sasaran RPD 2023 - 2026

Untuk mewujudkan Tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Landak 2023 - 2026 Kabupaten Landak , maka tujuan yang hendak dicapai dalam membangun sektor Komunikasi, Informatika, Statistik dan persandian tahun 2025 yaitu:

1. Meningkatkan Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan ;
2. Meningkatkan Ketersediaan Data Statistik Pembangunan yang Akurat dan Reliabel ;
3. Mewujudkan Peran Persandian dalam pelaksanaan Keamanan Informasi .
4. Meningkatkan Aksesibilitas telekomunikasi dan internet .

3.2.2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan dengan indikator outcome yang terukur. Dalam perumusan Sasaran, harus benar-benar diperhatikan keterukuran dari indikator kinerja Sasaran yang akan diukur. Sasaran yang hendak dicapai dalam membangun Komunikasi, Informatika, Statistik dan persandian tahun 2025 yaitu:

1. Meningkatnya Infrastruktur Teknologi Informasi dan Jaringan Telekomunikasi yang merata di daerah Kabupaten Landak ;
2. Pemanfaatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan dan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak ;
3. Ketersediaan Data Statistik Sektorial yang lengkap, akurat dan tepat waktu ;
4. peran persandian dalam pelaksanaan keamanan informasi .
5. Meningkatnya Pembangunan Infrastuktur Telekomunikasi di Wilayah Kabupaten Landak .

Table 2.5

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Landak

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN /SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-			
				2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan		1.Jumlah SPBE yang dibangun dan dikembangkan untuk menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	71 Jumlah SPBE	73 Jumlah SPBE	75 Jumlah SPBE	77 Jumlah SPBE
			2.Persentase ketersediaan infrastruktur sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	28,57 %	42,86 %	57,14 %	71,43 %
			3.Jumlah Website yang dikelola dan dikembangkan Pemerintah Daerah	45 Jumlah Website	47 Jumlah Website	49 Jumlah Website	51 Jumlah Website
		1. Meningkatnya Infrastruktur Teknologi Informasi dan Jaringan Telekomunikasi yang merata di daerah Kabupaten Landak	1. Persentase Aplikasi Yang Mendukung Pelayanan Publik	40 %	60 %	80 %	100 %

			2. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	26,31 %	52,63 %	92,10 %	100 %
			3. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	85 %	87 %	89 %	92 %
			4. Persentase Website yang sudah di kelola oleh Diskominfo	25 %	50 %	75 %	100 %
			5. Persentase Website yang sudah di kembangkan oleh Diskominfo	25 %	50 %	75 %	100 %
		2. Meningkatkan Pemanfaatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan dan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik di	1. Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan	45 %	50 %	55 %	60 %

		Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak	program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi/Kabupaten/Kota				
			2. Persentase Pemanfaatan Teknologi , Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan dan Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak	100 %	100 %	100 %	100 %
2.	Meningkatkan Ketersediaan Data Statistik Pembangunan yang akurat dan reliable		1.Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	100 %	100 %	100 %	100 %
		1. Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral yang lengkap, akurat dan tepat waktu	1. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan Data Statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %
			2. Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam	100 %	100 %	100 %	100 %

			melakukan evaluasi pembangunan daerah				
3.	Mewujudkan Peran Persandian dalam Pelaksanaan Keamanan Informasi		1.Persentase Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	24,00 %	24,25 %	24,50 %	24,75 %
		1.Meningkatnya peran persandian dalam pelaksanaan keamanan informasi	1.Persentase Pengamanan Informasi Daerah yang terselenggara dengan baik	24,00 %	24,25 %	24,50 %	24,75 %
4.	Meningkatkan aksesibilitas telekomunikasi dan internet		1.Menurunnya Desa Non Sinyal (<i>Blank Spot</i>) Area	26 Desa	24 Desa	22 Desa	20 Desa
		1.Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi di Wilayah Kabupaten Landak	1.Jumlah Infrastruktur Telekomunikasi yang tersedia	184 Menara	187 Menara	190 Menara	193 Menara

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak

3.2.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan

dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran yang termuat dalam Rencana Strategis supaya efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna).

Table 2.6

Strategi	Arah Kebijakan
1. Menganalisa Kebutuhan Aplikasi yang Mendukung Pelayanan Publik.	Membangun Tim Percepatan Pembangunan Aplikasi Pendukung Pelayanan Publik.
2. Mengembangkan dan memaksimalkan Potensi Integrasi Pelayanan Publik..	Mengevaluasi dan menentukan aplikasi yang berpotensi untuk dapat diintegrasikan.
3. Menyampaikan Daftar nama – nama ASN yang berlatar belakang pendidikan yang diperlukan kepada Instansi terkait.	Keselaran Latar Belakang Pendidikan dengan Tugas dan Jabatan.
4. Melakukan Tata Kelola sumber daya Teknologi Informasi yang terpusat di Dinas Kominfo	Menetapkan Dinas Kominfo sebagai OPD Pengelola seluruh sumberdaya Infrastruktur Teknologi Informasi Pemda
5. Melakukan Implementasi Aplikasi umum didampingi oleh Jabatan Fungsional yang membidangi	Penugasan Jabatan Fungsional sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi
	Menentukan/menunjuk petugas

6. Membangun Web Portal yang dapat mengakomodir seluruh Website OPD	pengelola Web Portal.
7. Menganalisa dan Mengevaluasi ketersediaan Website untuk dapat memaksimalkan Potensi Fitur Website.	Membangun Tim Pengelolaan Website.
8. Melakukan Implementasi Aplikasi umum didampingi oleh Jabatan Fungsional yang membidangi	Penugasan Jabatan Fungsional sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi
9. Peningkatan peran PPID pembantu seluruh OPD dalam Keterbukaan Informasi	Memberikan Pembinaan dan mengarahkan seluruh perangkat daerah agar informatif dalam memberikan informasi penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat
10. Peningkatan Kemampuan SDM melalui Pelatihan yang berkualitas	Mengikuti Bimbingan Teknis terkait dengan peningkatan Kualitas SDM baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah maupun pihak swasta
11. Penambahan Sarana dan Prasarana Kerja yang memadai	Mengusulkan Terkait Penambahan Sarana dan Prasarana dalam menunjang Pelaksanaan Kegiatan baik itu di Pemerintah daerah maupun di Pemerintah Pusat
12. Menyediakan Data Statistik Sektoral Daerah yang berkualitas	1. Mengintegrasikan Data Statistik Kabupaten Landak ke Dalam Portal Satu Data
	2. Membangun Metadata Statistik Sektoral
13. Meningkatkan Layanan Keamanan Informasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah berbasis Elektronik	1. Membuat Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi
	2. Menyediakan Layanan Keamanan Informasi baik secara elektronik maupun non elektronik
	3. Meningkatkan Kompetensi SDM

	Persandian melalui Diklat Fungsional maupun Teknis.
14. Mengumpulkan data dukung daerah blankspot dan mengajukan permohonan pembangunan menara telekomunikasi	Menentukan Daerah Prioritas bila Quota Pembangunan Terbatas
15. Menyiapkan data yang sudah tervalidasi daerah yang akan dibangun infrastruktur	Memastikan Data sudah di Validasi untuk mendapatkan Kelayakan Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak merupakan program prioritas RPD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPD, selanjutnya dijabarkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Landak namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN, APBD Kabupaten Landak, dan sumber-sumber pendanaan lainnya).

Table 2.7

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kab. Landak

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif (Rp)	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				7.716.750.000				7.778.082.000
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase unit kerja yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana kerja, meningkatnya evaluasi kinerja dan laporan keuangan/aset	Landak	100,00%	4.515.949.000	Dana Transfer Umum-DAU		100,00%	4.497.275.000
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra-PD , Renja-PD, RKA-SKPD, DPA-SKPD, LAKIP-PD dan evaluasi renja	Landak	8 Dokumen	108.360.616	Dana Transfer Umum-DAU		8 Dok.	110.907.089

2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Landak	7 Dokumen	31.257.870	Dana Transfer Umum-DAU		7 Dokumen	31.992.430
2.16.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah Dokumen RKA – SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA – SKPD	Landak	1 Dokumen	10.419.290	Dana Transfer Umum-DAU		1 Dokumen	10.664.142
2.16.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA –SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Landak	3 Dokumen	7.814.468	Dana Transfer Umum-DAU		3 Dokumen	7.998.107
2.16.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Landak	1 Dokumen	10.419.290	Dana Transfer Umum-DAU		1 Dokumen	10.664.143
2.16.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah DokumenPerubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Landak	3 Dokumen	7.814.468	Dana Transfer Umum-DAU		3 Dokumen	7.998.107
2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Landak	5 Laporan	26.048.225	Dana Transfer Umum-DAU		5 Laporan	26.660.358
2.16.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Landak	4 Laporan	14.587.006	Dana Transfer		4 Laporan	14.929.801

						Umum- DAU			
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Pangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah	Landak	12 Lap.	2.880.224.663	Dana Transfer Umum- DAU		12 Lap.	2.823.111.141
2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Landak	49 Orang/bulan	2.627.750.381	Dana Transfer Umum- DAU		51 Orang	2.651.103.714
2.16.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Landak	7 Dokumen	130.047.624	Dana Transfer Umum- DAU		3 Dokumen	46.703.743
2.16.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Landak	240 Dokumen	26.048.225	Dana Transfer Umum- DAU		250 Dokumen	26.660.358
2.16.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Landak	12 Dokumen	26.048.225	Dana Transfer Umum- DAU		12 Dokumen	26.660.358
2.16.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusun Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Landak	1 Laporan	13.024.113	Dana Transfer Umum- DAU		1 Laporan	13.330.179

2.16.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Landak	3 Dokumen	10.419.290	Dana Transfer Umum-DAU		3 Dokumen	10.664.143
2.16.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulnan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Landak	30 Laporan	36.467.515	Dana Transfer Umum-DAU		30 Laporan	37.324.502
2.16.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Landak	2 Dokumen	10.419.290	Dana Transfer Umum-DAU		2 Dokumen	10.664.143
2.16.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada perangkat daerah	Landak	9 Lap.	46.886.805	Dana Transfer Umum-DAU		9 Lap.	47.988.645
2.16.01.2.03.01	Penyusun Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Landak	1 Dokumen	5.209.645	Dana Transfer Umum-DAU		1 Dokumen	5.332.072
2.16.01.2.03.02	Pengaman Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Landak	1 Dokumen	5.209.645	Dana Transfer Umum-DAU		1 Dokumen	5.332.072

2.16.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Landak	1 Laporan	5.209.645	Dana Transfer Umum-DAU		1 Laporan	5.332.072
2.16.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Landak	1 Laporan	5.209.645	Dana Transfer Umum-DAU		1 Laporan	5.332.072
2.16.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Landak	2 Laporan	10.419.290	Dana Transfer Umum-DAU		2 Laporan	10.664.143
2.16.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Landak	2 Laporan	10.419.290	Dana Transfer Umum-DAU		2 Laporan	10.664.143
2.16.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Landak	1 Dokumen	5.209.645	Dana Transfer Umum-DAU		1 Dokumen	5.332.072
2.16.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Pangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Landak	4 Lap.	16.670.684	Dana Transfer Umum-DAU		4 Lap.	17.062.629
2.16.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Landak	1 Dokumen	4.167.716	Dana Transfer Umum-		1 Dokumen	4.265.657

						DAU			
2.16.01.2.04.02	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah,serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Landak	1 Dokumen	4.167.716	Dana Transfer Umum-DAU		1 Dokumen	4.265.657
2.16.01.2.04.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Landak	1 Laporan	4.167.716	Dana Transfer Umum-DAU		1 Laporan	4.265.657
2.16.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Landak	1 Laporan	4.167.716	Dana Transfer Umum-DAU		1 Laporan	4.265.657
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan Administrasi Kepegawaian	Landak	8 Lap.	244.228.158	Dana Transfer Umum-DAU		8 Lap.	249.967.519
2.16.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Landak	5 Unit	36.467.515	Dana Transfer Umum-DAU		6 Unit	37.324.502
2.16.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Landak	43 Paket	35.842.358	Dana Transfer Umum-DAU		43 Paket	36.684.653

2.16.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Landak	1 Dokumen	5.209.645	Dana Transfer Umum-DAU		1 Dokumen	5.332.072
2.16.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Landak	1 Dokumen	5.209.645	Dana Transfer Umum-DAU		1 Dokumen	5.332.072
2.16.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Landak	1 Dokumen	5.209.645	Dana Transfer Umum-DAU		1 Dokumen	5.332.072
2.16.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Landak	5 Orang	52.096.450	Dana Transfer Umum-DAU		5 Orang	53.320.717
2.16.01.2.05.10	Sosialisasi Pereturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Landak	5 Orang	52.096.450	Dana Transfer Umum-DAU		5 Orang	53.320.717
2.16.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Landak	5 Orang	52.096.450	Dana Transfer Umum-DAU		5 Orang	53.320.717
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitas Administrasi Umum Perangkat Daerah	Landak	14 Keg.	586.085.063	Dana Transfer Umum-		16 Keg.	599.858.061

						DAU			
2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Landak	1 Paket	7.814.468	Dana Transfer Umum-DAU		1 Paket	7.998.107
2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Landak	1 Paket	41.667.160	Dana Transfer Umum-DAU		1 Paket	42.656.573
2.16.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Landak	2 Paket	41.667.160	Dana Transfer Umum-DAU		100%	42.656.573
2.16.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Landak	1 Paket	15.628.935	Dana Transfer Umum-DAU		1 Paket	15.996.215
2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Landak	1 Paket	46.886.805	Dana Transfer Umum-DAU		1 Paket	47.988.645
2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Landak	3.800 Dokumen	156.289.350	Dana Transfer Umum-DAU		3.900 Dokumen	159.962.150

2.16.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Landak	1 Paket	10.419.290	Dana Transfer Umum-DAU		1 Paket	10.664.143
2.16.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Landak	1 Laporan	5.209.645	Dana Transfer Umum-DAU		1 Laporan	5.332.072
2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Landak	50 Laporan	244.853.315	Dana Transfer Umum-DAU		60 Laporan	250.607.368
2.16.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Landak	12 Dokumen	15.628.935	Dana Transfer Umum-DAU		12 Dokumen	15.996.215
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah	Landak	100,00%	384.992.766	Dana Transfer Umum-DAU		100,00%	394.040.095
2.16.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Landak	2 Unit	72.935.030	Dana Transfer Umum-DAU		2 Unit	74.649.003
2.16.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Landak	46 Unit	35.946.551	Dana Transfer Umum-		46 Unit	36.791.294

						DAU			
2.16.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Landak	5 Unit	26.048.225	Dana Transfer Umum-DAU		5 Unit	26.660.358
2.16.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Landak	5 Unit	26.048.225	Dana Transfer Umum-DAU		5 Unit	26.660.358
2.16.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Landak	1 Unit	156.289.350	Dana Transfer Umum-DAU		1 Unit	159.962.150
2.16.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Landak	5 unit	52.096.450	Dana Transfer Umum-DAU		5 Unit	53.320.717
2.16.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Landak	3 Unit	15.628.935	Dana Transfer Umum-DAU		3 Unit	15.996.215
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah	Landak	100,00%	138.055.593	Dana Transfer Umum-DAU		100,00%	141.299.899

2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Landak	1 Laporan	7.814.468	Dana Transfer Umum-DAU		1 Laporan	7.998.107
2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Landak	4 Laporan	62.515.740	Dana Transfer Umum-DAU		4 Laporan	63.984.860
2.16.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Landak	1 Laporan	57.306.095	Dana Transfer Umum-DAU		1 Laporan	58.652.788
2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Landak	1 Laporan	10.419.290	Dana Transfer Umum-DAU		1 Laporan	10.664.143
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Operasional dan Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Perangkat Daerah	Landak	100,00%	110.444.474	Dana Transfer Umum-DAU		100,00%	113.039.921
2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Landak	10 Unit	5.209.645	Dana Transfer Umum-DAU		10 Unit	5.332.072
2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan	Landak	1 Unit	520.965	Dana Transfer Umum-		1 Unit	533.207

		Perizinnya				DAU			
2.16.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Landak	40 Unit	8.335.432	Dana Transfer Umum-DAU		40 Unit	8.531.315
2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Landak	10 Unit	10.419.290	Dana Transfer Umum-DAU		10 Unit	10.664.143
2.16.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Landak	5 Unit	7.814.468	Dana Transfer Umum-DAU		5 Unit	7.998.107
2.16.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Landak	1 Unit	26.048.225	Dana Transfer Umum-DAU		1 Unit	26.660.358
2.16.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Landak	5 Unit	26.048.225	Dana Transfer Umum-DAU		5 Unit	26.660.359
2.16.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Landak	5 Unit	26.048.225	Dana Transfer Umum-DAU		5 Unit	26.660.359

2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Informasi Pembangunan Daerah yang disebarluaskan	Landak	60,00%	1.824.623.000	Dana Transfer Umum-DAU		65,00%	1.870.232.000
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunkasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	PersentaseTerlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Landak	65,00%	1.824.623.000	Dana Transfer Umum-DAU		70,00%	1.870.232.000
2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Landak	3 Dokumen	114.999.500	Dana Transfer Umum-DAU		3 Dokumen	117.874.488
2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Landak	2 Dokumen	261.362.500	Dana Transfer Umum-DAU		2 Dokumen	267.896.563
2.16.02.2.01.10	Penguatan Kapasitas Sumber daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	Landak	6 Orang	94.090.500	Dana Transfer Umum-DAU		6 Orang	96.442.763
2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Landak	32 Dokumen	1.354.170.500	Dana Transfer Umum-DAU		32 Dokumen	1.388.018.187
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Jumlah Layanan Aplikasi yang dimiliki	Landak	71 Unit	1.376.178.100	Dana Transfer			1.410.575.000

		oleh Pemerintah Daerah				Umum-DAU			
		Jumlah Pengusulan Infrastruktur Telekomunikasi kepada Penyedia Layanan Telekomunikasi	Landak	360 Unit		Dana Transfer Umum-DAU			
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemrintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan domain pemerintah daerah	Landak	71 PD	731.815.000	Dana Transfer Umum-DAU		76 PD	750.110.375
2.16.03.2.01.02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengwas Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Landak	3 Dokumen	104.545.000	Dana Transfer Umum-DAU		4 Dokumen	107.158.625
2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemeritah Daerah	Landak	35 Unit	627.270.000	Dana Transfer Umum-DAU		38 Unit	642.951.750
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Landak	12 Bulan	644.363.000			12 Bulan	660.464.625
		Jumlah Konsultasi dan Koordinasi Pengusulan Infrastruktur Telekomunikasi kepada Penyedia Layanan	Landak	56 Kali		Dana Transfer Umum-DAU		62 Kali	

		Telekomunikasi							
2.16.03.2.02.04	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Landak	7 Dokumen	121.638.000	Dana Transfer Umum-DAU		8 Dokumen	124.671.500
2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Landak	71 Unit	104.545.000	Dana Transfer Umum-DAU		76 Unit	107.158.625
2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	Landak	1 Dokumen	418.180.000	Dana Transfer Umum-DAU		1 Dokumen	428.634.500
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				418.174.000				428.623.000
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase tersedianya sistem data statistik sektoral yang terintegrasi	Landak	80%	418.174.000	Dana Transfer Umum-DAU		85%	428.623.000
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten Landak	Landak	80%	418.174.000	Dana Transfer Umum-DAU		85%	428.623.000
2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan	Landak	6 Dokumen	125.454.000	Dana Transfer		6 Dokumen	128.590.350

		,Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				Umum-DAU			
2.20.02.2.01.02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Landak	2 Orang	20.909.000	Dana Transfer Umum-DAU		2 Orang	21.431.725
2.20.02.2.01.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Landak	1 Dokumen	52.272.500	Dana Transfer Umum-DAU		1 Dokumen	53.579.313
2.20.02.2.01.04	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah PD mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPJS	Landak	38 Orang	52.272.500	Dana Transfer Umum-DAU		38 Orang	53.579.313
2.20.02.2.01.05	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	Landak	1 Unit	87.817.800	Dana Transfer Umum-DAU		1 Unit	90.013.245
2.20.02.2.01.06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	Landak	1 Dokumen	79.448.200	Dana Transfer Umum-DAU		1 Dokumen	81.429.055
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				365.895.000				375.037.000
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase tersedianya keamanan Informasi Pemerintah	Landak	60,00%	365.895.000	Dana Transfer Umum-		65,00%	375.037.000

						DAU			
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan persandian keamanan Informasi Pemerintah	Landak	60,00%	365.895.000	Dana Transfer Umum-DAU		65,00%	375.037.000
2.21.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Landak	1 Dokumen	47.045.250	Dana Transfer Umum-DAU		1 Dokumen	48.221.381
2.21.02.2.01.02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Landak	1 Laporan	20.909.000	Dana Transfer Umum-DAU		1 Laporan	21.431.725
2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informai Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Landak	1 Laporan	130.681.250	Dana Transfer Umum-DAU		1 Laporan	133.948.281
2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informai Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Landak	1 Perangkat Daerah	167.259.500	Dana Transfer Umum-DAU		1 Perangkat Daerah	171.435.612
				Total	8.500.819.000				8.581.742.000

BAB V

PENUTUP

Renja Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak merupakan Dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah, dimana penyusunan dokumen tersebut sesuai dengan amanat Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap satuan kerja perangkat daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Tahun OPD.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak disusun sebagai pelaksanaan dari Renstra Kominfo Tahun 2023 – 2026. Rencana Kerja (Renja) ini berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Komunikasi, Informatika , Statistik dan Persandian.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak tahun 2025 diharapkan dapat memberikan umpan balik yang positif dalam pengambilan keputusan dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah terhadap upaya pemenuhan berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan berbasis pada masyarakat melalui peningkatan keterlibatan para pelaku pembangunan (stakeholders) dalam mewujudkan Good Governance.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak Tahun 2025 ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM, dan sumber pendanaannya serta pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak. Diharapkan semua elemen kelembagaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Landak dapat melaksanakannya.

Ngabang , 5 Juli 2024

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika

Kabupaten Landak



EFRAIM PATA'ALLORANTE, ST, M.AP
NIP. 19680207 200212 1 007